



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (VIRTUAL)
KOMISI XI DPR RI
DENGAN KETUA UMUM KADIN DAN APINDO**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 27 April 2020
W a k t u	: 11.00 WIB s.d. selesai
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Ketua Komisi XI DPR RI)
Acara	: Pemaparan Kadin dan Apindo mengenai kondisi dunia usaha di tengah pandemik Covid-19
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Hadir	: KETUA UMUM APINDO KETUA UMUM KADIN (ROSAN ROESLANI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Namo buddhaya

Salam kebajikan

Yang kami hormati Pimpinan Komisi XI DPR-RI, Anggota Komisi XI DPR-RI

Yang kami hormati Ketua Kadin se-Indonesia, Pak Rosan Roeslani

Hadir di sini mungkin juga Ibu Sinta, Pak Joni Darmawan, Pak Raden Pardede, Pak Beni Sutrisno dan Pak Iwan.

Kemudian dari Apindo, Yang kami hormati Ketua Umum Pak Haryadi Sukamdani, tadi saya belum lihat juga ada Pak Anton, Pak Anton Supri, mungkin hadir juga Pak Suryadi, Pak Sutrisno, dan mungkin Pak Danang.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan dalam rangka bulan puasa ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR-RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Jadi kita dapat menjalankan ibadah puasa ini, dimudahkan diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemik Covid 19 ini.

Sekali lagi terima kasih. Jadi Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini hari Senin tanggal berapa nih, dinyatakan tertutup dan dinyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11 WIB)

Baik, untuk menyingkat waktu, jadi mekanisme kita seperti yang lalu bahwa kita akan mulai tepat jam 11 karena ini bulan puasa, mungkin mohon kesediaan dari Ibu dan Bapak-Bapak sekalian nanti tepat pukul 12.00, pada waktu kita dzuhur untuk di-break kira-kira 15 menit karena ini bulan puasa kalau bisa kita tepat waktu untuk menjalankan sholat dzuhur. 15 menit, 12 seperempat kemudian kita lanjutkan dan kita mengharapkan selesai jam 15.30 paling akhir, paling telat jam 4 karena Sekretariat kita sebagai *host* harus bekerja di Sekretariat di DPR RI, karena kita udah coba *work from home*, tidak mampu. Jadi karena banyak ininya yang mengikuti jadi dilakukan di Sekretariat sehingga mereka jam 4 bisa diberi kesempatan untuk pulang ke rumah, jam 5 bisa mempersiapkan untuk buka puasa. Jadi insyaallah jam 4 saya kira mestinya sudah bisa selesai.

Dan nanti seperti biasa kita akan setelah presentasi dan dari Kadin, kemudian Apindo akan memaparkan pemaparannya dengan judul kondisi dunia usaha ditengah pandemik Covid-19. Dimana bahannya udah kami terima, terima kasih Pak Rosan dan Pak Haryadi, Pak Anton, bahan udah kami terima tentunya kawan-kawan dan Pimpinan dan Anggota Komisi XI setelah mempelajari bahan-bahan tersebut dan nanti setelah dipresentasikan kita akan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR-RI untuk memberikan

pendalaman-pendalaman nanti seperti biasa akan kita daftar per fraksi. Kalau selesai satu putaran lebih satu putaran kalau tidak selesai jadi 2 putaran tapi saya mengusulkan supaya ada variasi kalau kita mulai dari atas bawah atas bawah apakah bisa diterima misalnya dari PDI, kemudian dari bawah PPP, kemudian Golkar, kemudian apa itu, PAN setelah itu dari atas bawah atas bawah. Biasanya kita dari atas ke bawah, kalau diizinkan kita putar bervariasi dari atas ke bawah. Apakah dapat diterima teman-teman? Nggak ada suaranya ya?

ANGGOTA:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Setuju ya, baik kalau gitu untuk menyingkat waktu kami persilakan dari Kadin se-Indonesia, Ketua umum Pak Rosan Roeslani untuk dapat memberikan pemaparannya pada siang hari ini, karena tertutup ya silakan untuk menyampaikan hal-hal yang dialami oleh dunia usaha di tengah-tengah Covid pandemic Covid 19 ini karena informasi dari dunia usaha tentunya sangat kami butuhkan informasi dari dunia usaha. Perlu kami sampaikan ini ke pak untuk Kadin dari Apindo, kami telah melakukan rapat dengan KSSK pada tanggal 6 April yang lalu, hari Senin yang lalu dengan BI, OJK, dan LPS. Kemudian hari Selasa nya kami dengan OJK, rabunya dengan Bank Indonesia terus dengan LPS kemudian minggu depannya OJK dengan semua perbankan Mandiri dan BRI dan dengan BNI, BTN, kemudian dengan LPS dan dengan BPN.. eh dengan BPR, dan BPD juga kemudian Bursa Efek Indonesia. Jadi rata-rata dengan Asosiasi Pembiayaan juga sudah kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat. Jadi stakeholder dari seluruh yang terlibat dari KSSK terakhir sekarang dengan Apindo.

Besok yang kedua kami lanjutkan dengan KSSK, dengan Menteri Keuangan, dengan Gubernur BI, OJK, dan LPS, kemudian dilanjutkan dengan Bappenas, dan lain sebagainya. Jadi kami di tengah-tengah pandemik Covid ini melakukan rapat regular secara rutin dengan KSSK jadi semuanya bergerak begitu cepat.

Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan Kadin di Indonesia Pak Rosan Roeslani untuk dapat memberikan pemaparannya waktu kami persilahkan.

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Shalom om swastiastu

Namo buddhaya

Salam kebajikan

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi XI Bapak Dito dan juga

Kepada yang terhormat Anggota dewan yang telah memberikan waktu kepada kami dunia usaha Kadin Apindo untuk memberikan apa pandangan dan juga paparannya menyangkut keber.. apa keberadaan dunia usaha yang berhubungan dengan Covid 19 ini.

Mohon ijin berapa lama Pak Ketua diperbolehkan untuk memberikan paparannya?

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Kita akan selesai jam 3 setengah 4 selesai dengan pendalaman serta memungkinkan setengah jam bisa. Terserah, pemaparan sudah kami terima tapi kalau bisa disampaikan lagi mungkin lebih baik pak. Kita tidak ada tidak ada tidak ada kesimpulan, jadi mungkin agak longgar waktunya silakan silakan pak.

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Baik, terimakasih pak Ketua.

Memang mungkin saya tidak apa halaman per halaman, nanti apa tetap akan kami tampilkan juga, kita sudah sering bahan-bahannya. Tetapi di dunia usaha kita berkomunikasi nih Pak Ketua dan Anggota dewan terhormat secara regular, berkala dengan para asosiasi dengan industri apa dengan.. Wan nanti aja Wan, nanti aja belakangan (berbicara dengan juru tayang).. Dengan industri dengan asosiasi yang kita lakukan secara berkala untuk mengupdate bagaimana keadaan dunia usaha ini hari per hari. Karena kita menyadari bahwa semakin panjangnya penanganan Covid 19 ini, semakin panjang pula tekanan terhadap perekonomian kita.

Memang karena kesehatan dan perekonomian sekarang berjalan beriringan, dan kalau boleh saya sampaikan sedikit, semua dunia usaha ini terdampak. Semuanya terdampak hanya mungkin beberapa yang masih baik dan ada beberapa justru yang kondisinya malah sangat baik gitu. Contohnya yang masih baik adalah perusahaan rokok tentunya karena walaupun bulan puasa sesudah bulan puasa banyak yang merokok nih. Jadi perusahaan rokok itu menikmati keadaan seperti ini dan tentu juga perusahaan telekomunikasi, perusahaan tower atau BTS, itu mereka *performance*-nya justru sangat meningkat. Tetapi di luar itu semuanya terdampak dalam apa industrinya masing-masing dalam skala yang sangat besar, besar, maupun medium, tetapi kelihatannya semakin panjang ini berjalan dampaknya rata-rata bisa masuk ke daerah yang besar.

Nah, dan kami pun mungkin langsung masuk bahwa kita sebagai dunia usaha juga coba mengantisipasi ini. Kita melihat apakah ini akan berakhir dengan cepat, menengah, atau agak lama karena akhirnya kami memang selalu menyampaikan kita ingin yang terbaik, *We hope for the best* tetapi *we have to prepare for the worst*, gitu. Nah, asumsi yang kami ambil memang apa keinginannya ini bisa cepat *recovery* atau istilahnya kurva V tetapi melihat keadaannya seperti ini kelihatannya justru ini berada di kurva U gitu dan turun dulu agak panjang kemudian naik lagi. Nah yang kita ingin sebagai dunia usaha ingin coba lakukan dan tidak ingin adanya PHK atau rumahkan karena memang itu adalah opsi terakhir,

memPHK-kan atau merumahkan tetapi datanya secara keseluruhan kalau bicara dengan teman-teman dunia usaha, asosiasi. pengusaha seperti mungkin yang sudah sempat saya sampaikan nafasnya nih antara 3 bulan sampai 5 bulan secara *average* kalau kami bicara dengan teman-teman asosiasi, dan kalau boleh saya *break down* sedikit satu per satu tentunya yang paling terdampak adalah pariwisata dan turunannya. Kita tahu perhotelan mungkin nanti mas Radit bisa menjelaskan sebagai Ketua perhotelan Indonesia, atau PHRI.

Hotel kita yang kurang lebih sekarang sudah hampir 1.700 yang tutup dengan *occupancy rate*-nya saya rasa sekarang sudah sudah di bawah 10% rata-rata karena dapat laporannya kalau dan pekerjanya yang sudah di-PHK kan berdasarkan data sekitar 150.000. Kita melihat angka dari KeMenterian tenaga kerja dari minggu per minggu yang tadinya 1,5 juta yang sudah dirumahkan atau di PHK-kan sekarang sudah mencapai level 3,5 juta sekarang naik lagi sekitar hampir 5 juta dan di sektor pertanian ini yang dilaporkan justru baru dari 31 provinsi. 3 Provinsi belum belum melaporkan tetapi justru yang banyak melaporkan adalah dari Jawa Barat karena mungkin Jawa Barat laporannya lebih lebih rajin. Justru sudah di Bali sedikit, jadi sebetulnya itu yang sudah melaporkan tetapi kalau yang tidak melaporkan kita kita meyakini angkanya menjadi jauh di atas itu.

Tentunya kita tahu perhotelan dan turunannya ya restoran, saya juga diinformasikan dengan pemilik salah satu restoran yang mempunyai outlet 700 outlet lebih sekarang dia sudah menutup 300 outletnya. Itu baru dari satu restoran yang mempunyai outlet begitu banyak dan juga apa kalau dari restoran ini dampaknya juga sangat signifikan termasuk ke UMKM yang banyak bergerak di bidang restoran ini, dan kalau kita lihat juga memang sebagian besar tamu kita juga dari Cina. Kurang lebih hampir 20% kalau di Bali, kalau internasionalnya hampir 15% tentunya ini memberikan dampak yang sangat luar biasa.

Kalau penerbangan juga sama kita tahu penerbangan hampir semua penerbangan di bandara bandara terganggu (suara tidak jelas) secara *average* turunnya antara penurunannya di empat bandara-bandara besar seperti Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda dan Batam menjadi sangat-sangat menyedihkan. Kerugian berdasarkan Bank Indonesia saya *quotes* sedikit dari pariwisata ini kerugiannya sekitar 7 triliun perbulan kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata berdasarkan Bank Indonesia.

Kemudian dari organda juga atau angkutan darat melaporkan sudah merumahkan 1 juta orangnya. Pertama yang beroperasi sekarang hanya antarkota tuh hanya 10%. Ini yang dilaporkan organda kepada kami kalau angkutan yang berhubungan pariwisata penurunannya sudah 90 malah sampai 95%. Kalau dalam kotanya antara penurunannya sudah sampai 70 sampai 90%. Kemudian sektor otomotif kita bicara dengan 3 Kingdom harapannya yang tadinya pada tahun 2020 penjualan masih diharapkan di level 1000 apa 1 juta seratus kendaraan. Mereka melaporkan bahwa mereka untung kalau bisa menjual 500.000 unit saja itu sudah bagus, tetapi kami di-*update* lagi oleh gaya hidup kelihatannya angkanya hanya 400.000 unit mereka bisa jual pada akhir tahun ini. Saya juga mendapat laporan dari contohnya asosiasi satpam atau abujapi. Mungkin 2 minggu yang lalu mereka menyatakan oh mereka hanya terdampak 10%, kemarin mereka menyampaikan sekarang yang sudah diberhentikan udah sampai 40% itu asosiasi *outsourc*e satpam. Sudah mengalami sampai 40%.

Kemudian sektor ritel berdasarkan dari hippindo atau APPBI yang melaporkan ke kami, kurang lebih 95% pusat belanja sudah melakukan penutupan

penyutapan parsial user atau penutupan separuh karena mereka tetap harus buka untuk yang berhubungan dengan supermarket, farmasi, ATM, dan F&B-nya mereka harus tetap buka tetapi penutupannya itu kurang lebih 9% 95% dan dilaporkan di retail market ini seperti di mall-mall kalau mereka udah tutup kemungkinan mereka buka yang buka lagi itu rata-rata hanya 40 sampai 50% kalau mereka yang sudah menutup outletnya di mall-mall itu berdasarkan history-nya mereka. Jadi, kalau mereka udah tutup biasanya kembalinya itu hanya 40 hanya ya sekitar 50 sampai 60%, dan yang sudah mendaftar ke kartu pra kerja dari APPBI dan hippindo melaporkan kurang lebih 266.082 orang pekerja yang mendaftar ke kartu pra kerja dari sektor ritel.

Kemudian dari sektor F&B penurunannya juga GAPMMI menginformasikan ke kami bahwa penurunannya kurang lebih 30 sampai 40% juga di sektor F&B berdasarkan keterangan dari GAPMMI. Di sektor farmasi dan obat-obatan kita menyangka mereka mustinya oke, tetapi peningkatan harga bahan baku obat ternyata mencapai 300 sampai 400%. Nah, ini juga ditambah lagi dengan kenaikan US Dollar karena 90% bahan bakunya mereka itu *raw materialnya* masih impor. Ditambah lagi farmasi bilang masih BPJS masih utang juga ke mereka kurang lebih 6 triliun. Jadi, kita menyangka farmasi oke tetapi kenaikan bahan baku 300-400 %, kemudian ditambah dolar yang naik, kemudian ditambah BPJS Kesehatan belum bayar sampai kurang lebih 6 triliun. Jadi mereka pun mengalami kendala karena mereka tidak bisa menaikkan harga obat karena itu ada aturan mainnya.

Jadi mereka pun apa mengurangi *outsourcing* yang ada di bidang mereka kurang lebih sampai 200.000, dan kendalanya juga tidak hanya farmasi adalah masalah distribusi karena ada banyak beberapa kota atau Kabupaten wilayah ini melakukan penutupan, sehingga distribusinya mereka juga akhir-akhir ini mengalami kendala. Ini pun dialami oleh sektor makanan minuman dan kita sudah mengkoordinasikan ini sudah menyampaikan ini beberapa waktu yang lalu kepada Pak Mendagri, Pak Tito dan kita sudah bicara dengan kabupaten kota pada saat itu untuk bisa melonggarkan jalur distribusi terutama yang berhubungan dengan farmasi, makanan minuman, dan juga obat-obatan.

Kemudian berikutnya adalah di sektor Real Estate terutama yang penurunan tajam adalah di kelas hunian justru menengah bawah, atas, jadi semua sudah mengalami penurunan dan dari Real Estate asosiasi mengatakan sudah 174.000 yang sudah dirumahkan dan di PHK karena penjualan kinerja penurunan kinerja dan juga penjualan unit dan jasa real estate yang sangat menurun.

Di sector garmen sekarang banyak temen-temen garmen akhirnya beralih membuat APD dan masker. Ini cukup membantu juga walaupun secara cash flow tidak bisa menutupi apa *performancenya* tekanan tetap besar dan beberapa perusahaan juga sudah mengalami kendala, penurunan karena terutama yang ekspor itu juga sudah mengalami kendala, sehingga terjadi penurunan yang juga sangat signifikan di sektor garmen.

Di sektor elektronik kurang lebih dari asosiasi-nya GABEL menyatakan penurunan pasarnya per 3 April ini sudah sampai di level 40 sampai 50% produk elektronik ini sudah terjadi baru bulan Februari dan Maret dan diperkirakan akan makin memburuk. Pelayaran perkapalan menyampaikan kami dari INSA penurunannya kurang lebih sudah 30% dan untuk melayani pengiriman jasa dan cargo itu juga mengalami penurunan, jadi kurang lebih penurunannya 30% dan di banyak industri lainnya tentunya berdampak juga tapi kurang lebih itu yang

berdampak ya konstruksi, semen itu juga sangat berdampak karena banyaknya pembangunan yang mengalami penurunan atau ditunda pada saat-saat ini.

Memang secara kalau secara industri itu yang kita alami dan kembali lagi semua sampaikan nafasnya antara 3 sampai 5 bulan. Buat kita bagaimana kita sekarang bisa bertahan dulu *moodnya* adalah *mood* bertahan menjaga *cash flow*, menjaga likuiditas, itu adalah hal yang paling penting buat kita. Karena ya kalau tidak ada *cash flow* tidak ada likuiditas ujungnya kita harus ya mem-PHK dan juga menutup usaha kita dan itu adalah hal yang sangat kita ingin hindari dan tentunya apa kenaikan US Dollar pada saat ini ya membuat tekanan kepada industri terutama yang komponen *raw materialnya* atau bahan bakunya ini masih impor dan kita ketahui hampir 70% kita masih berbahan baku impor. Nah, tapi memang *demand-nya* pun juga memang masih rendah pada saat ini. Nah yang saya mau ingin sampaikan juga adalah tekanan yang sangat besar kepada teman-teman dari UMKM. Kalau tahun 98 motor dari apa krisis ekonomi kita yang menyelamatkan menyelamatkan kita adalah sektor UMKM, tetapi sekarang justru yang banyak terdampak yang tertekan adalah sektor UMKM, dan sektor UMKM ini kalau kita lihat angkanya di perbankan kurang lebih 20% dari total *lending* di perbankan. Dari kurang lebih 5.700 triliun itu 1.100 triliun lebih hampir 1.200 triliun itu ada di sektor UMKM. Nah ini juga yang yang apa yang sangat besar tekanannya kepada teman-teman UMKM yang yang harus kita pikirkan segera bagaimana kita mencoba menyelamatkan tekanan pada sektor UMKM ini.

Nah yang saya mau sampaikan juga adalah mungkin dari sini adalah sektor-sektor perbankan. Sektor perbankan saya bicara dengan dengan beberapa bank dan juga Bank BUMN dan saya yakin juga Komisi XI saya yakin juga sudah mengupdate angkanya dari mereka. Untuk Bank BUMN, mereka yang hanya dalam waktu 1 bulan setengah ini yang sudah minta minta restrukturisasi itu rata-rata 20 sampai 25% dari 20 sampai 25% dari total *lending* mereka dalam waktu satu setengah sampai 2 bulan ini. Nah, dan kalau ini berlanjut sampai bulan Oktober, November, ini akan menyentuh berdasarkan laporan mereka ini akan menyentuh 40 sampai 50% dari total portofolio mereka.

Total portofolio mereka di perbankan adalah 5.700 triliun, tetapi kalau kita lihat ada 14% itu dalam denominasi dollar. Kalau kita mark to market mungkin akan menjadi 6000 triliun lebih total landing perbankan kita kepada pihak ketiga. Nah ini yang membuat harus kita pikirkan juga bersama-sama karena kita harus mencari penyelesaian ini secara komprehensif karena agak susah kalau kita hanya memikirkan dari segi sector riilnya saja tanpa memikirkan pendapatan secara keseluruhan ini ke sektor keuangan dan terutama sektor perbankan.

Saya juga mungkin mau tambahkan juga saya lupa bahwa di otomotif itu pabrik mobil seperti Suzuki, seperti Honda, seperti Mitsubishi itu sudah menutup pabriknya, Astra masih buka, tetapi Toyota Astra Motor Manufacturing, tapi sudah membatasi jumlah personel dan aktivitas operasinya. Nah, ini juga hal yang sepertinya saya harus sampaikan. Kalau kita lihat seperti ini kita ketahui kontraksi juga ke pasar modal kita kurang lebih hampir 25 sampai 27% oleh sebab itu kami melihat dan kami juga sudah melaporkan kepada usulan-usulan dari kami kurang lebih mungkin sudah sebulan yang lalu kami sudah laporkan kepada usulan kami kepada Bapak presiden dan juga Menteri-Menteri terkait.

Saya juga ingin menyampaikan bahwa TKI kita ini juga sudah kurang lebih ada akan 600.000 orang yang akan kembali ke Indonesia dan ini berpotensi menurunkan pemasukan valas yang berasal dari remitansi, itu kurang lebih 11

koma. Kita dulu 2016 itu 11,4 miliar dolar. Ini juga sebetulnya salah satu pendapatan yang sangat signifikan yang juga akan terdampak terhadap penerimaan negara kita. Ini saya rasa ingin menyinggung hal ini. Kembali lagi mengenai apa yang kita usulkan kepada apa kepada pemerintah adalah bahwa kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian ini jatuhnya dengan dengan subjek bahwa Kesehatan ini juga harus tetap terpenuhi, kita usulkan kesehatan ini harus besar, tegas, dan cepat itu kuncinya. *Big, bolt, and quick*, karena kita berpacu dengan waktu. Oleh sebab itu kami usulkan sejak sebulan yang lalu pada ke pemerintah untuk memberikan stimulus kepada Kesehatan, kepada jaring pengaman sosial atau *social safety net* dan juga kepada sektor riil dan keuangan kurang lebih angkanya 1.600 triliun.

Memang pada saat pertama kali kami utarakan ini, ini cukup mengagetkan karena saya mendapatkan respons yang bermacam-macam tapi pada saat itu dan tapi sekarang kami melihat responnya ternyata boleh dibilang sebagian besar ini positif gitu. Kenapa kami mengambil angka 1.600 triliun karena kita melihat ada perbandingan dengan dengan beberapa negara ini mungkin contohnya ada di ini seperti dengan Jerman ini ada 20%. Jepang di 19,9%, Malaysia di 18,7%, Singapura 10,9%, United State atau US sekarang malah sudah naik di level 15%, Australi 9,7%, Kanada 8,4%, Indonesia ini di level 2,7%. Ini berdasarkan tiga stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Terakhir adalah 405 yang awal ada 10 triliun kemudian 22 triliun dan ini yang terakhir 405 itu baru menggambarkan 2,7% berdasarkan percentage to PDB kita atau to GDP kita.

Oleh sebab itu kami melihat bahwa Covid-19 ini beberapa negara saja sudah mengambil langkah-langkah yang yang kedepannya saya di membaca lagi laporannya Amerika pun akan menambah lagi dari 12,3 dari 15% kemungkinan menambah sampai ke 30% dari PDB nya mereka atau kurang lebih 6 triliun US Dollar. Ini kembali sedang lagi dibahas di US atau di Amerika Serikat. Jerman juga melakukan hal sama walaupun sudah 20% mereka sekarang sedang membahas lagi untuk meningkatkan mencapai 30%.

Singapura juga sedang membicarakan untuk menambah lagi karena ternyata banyak migrant worker yang mulai terkena di Singapura sehingga Singapura pun malah pada saat ini membuat Rumah Sakit darurat baru untuk mengantisipasi apa penambahan lonjakan yang mendadak ini. Oleh sebab itu, kami melihat angka ini dan juga melihat bahwa Indonesia dengan penduduk 270 juta dengan perekonomian nomor 16 di terbesar di dunia ya angkanya memang harus signifikan. Kita mengusulkan dari 1,6 triliun itu adalah 400 juta untuk kami bilang jaring pengaman Kesehatan, itu adalah 400 triliun, ini dilakukan tentunya untuk mencegah, mengobati, mengurangi resiko penularan dan kematian, meningkatkan fasilitas dan peralatan Kesehatan, mendukung sektor dan pengembangan industri kesehatan dan kemampuan riset development, dan tentunya kalau kita lihat perbandingan untuk yang sudah melakukan rapid test kit di kita itu per satu juta baru hampir itungannya 160 orang di Indonesia.

Setiap 1 juta baru 160 orang, sedangkan di negara-negara lain negara tetangga kita mungkin Singapura yang paling advance itu sudah di level 12.000 orang per 1 juta. Amerika sudah di level 10.000 orang, kemudian Korea juga meningkatkan di level 11.000 orang. Kita dibanding oleh dibandingkan negara-negara ASEAN nya kita nomor 2 paling rendah sesudah Cambodia, Cambodia itu baru kurang lebih per 1 juta orang, 87 orang yang sudah di lakukan test kit.

Jadi memang kita memerlukan jaring pengaman kesehatan ini untuk angka yang besar tidak hanya kita dalam rangka me apa menanggulangi Covid 19 ini tapi juga untuk meningkatkan kemampuan research and development kita karena kita tidak tahu apakah ini bisa ada second wave yang yang dikawatirkan. Sehingga kurvanya nih bukan lagi V, bukan lagi U, bukan lagi L, bisa jadi W ini udah turun naik bisa turun lagi. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, jadi kita mengusulkan 400 triliun untuk jaring pengaman Kesehatan.

Yang kedua kami bilangnya adalah untuk jaring pengaman sosial ditingkatkan menjadi 600 triliun, kami melihat bahwa berdasarkan angka BPS Penduduk miskin kita kurang lebih ada 26 juta orang. Kemudian kita lihat angka dari BPJS Kesehatan yang menerima penerima bantuan iuran itu 96,7 juta orang. Yang menerima bantuan iuran melalui APBD itu 35 juta orang. Jadi total ada 130 juta orang yang penerima bantuan iuran yang itu sudah terdaftar di Kemensos. Sudah terdaftar di Kemensos sebagai fakir miskin dan orang-orang tidak mampu yang harus dibantu. Jadi kita belum lagi menghitung makin banyaknya kemungkinan orang yang akan turun masuk ke garis tidak mampu karena factor PHK atau dirumahkan, dan pemerintah memang harus terus menggalakkan program-programnya. Baik itu BLT, pra kerja, kemudian PKH dan program-program lain untuk memastikan jangan sampai rakyat kita ini istilah saya tuh lapar. Kalau udah lapar, nggak ada nggak ada apa tidak ada tidak bisa makan yang kita khawatirkan tentunya adalah gejolak sosial yang ingin kita hindarkan, karena kalau saya baca beberapa apa tulisan dari media asing, salah satu yang mereka khawatirkan adalah apa terjadinya gejolak sosial di kita apabila penanganan-penanganan ini tidak kita lakukan secara menyeluruh.

Berikutnya untuk berikutnya adalah 9 jaring pengaman sektor riil dan keuangan ini ditingkatkan menjadi 600 triliun. Yang dimana angkanya pada saat ini adalah 150 triliun. Saya ingin tekankan adalah saya berbicara juga dengan dengan BTN dan juga dengan BRI dan Mandiri untuk sektor real dan keuangan UMKM sendiri saja sudah 20% atau 1000 hampir 1.100 triliun lah, dan yang yang pada saat ini ternyata mereka terdampaknya lebih cepat kalau apa konsumen, korporasi hanya satu setengah bulan ini yang direstruktur sudah minta sampai 25% kalau UMKM ini ternyata bisa antara 60 50 sampai 60% pada saat ini. Hal ini yang harus kita segera dahulukan juga bersama-sama dengan yang lain karena penyerapan tenaga kerjanya di UMKM itu adalah 96,7% atau 115 juta orang tenaga kerja yang ada pada sector UMKM ini dan penyumbang 60% dari PDB kita itu ada di sector UMKM.

Saya mendapatkan laporan misalnya seperti KPR yang bersubsidi itu sudah terkendala semua. Nah mestinya pemerintah sudah step in dulu, misalnya untuk mereka karena itu juga tidak terlalu besar. Memang sudah ada POJK nomor 11 tetapi sejauh ini berdasarkan laporan yang kami terima semua belum begitu efektif gitu. Apa mereka pihak bisa dimengerti karena pihak perbankan juga pada saat ini kalau mereka bilang kalau mereka melakukan restrukturisasi semua tanpa ada pembayaran, kemudian di satu sisi mereka tetap harus melakukan pembayaran kepada deposito pasti mereka akan mengalami suatu tekanan yang sangat sangat besar terhadap perbankan mereka. Nah memang dalam hal ini OJK harus memberikan apa pemahaman dan juga bicara mereka lebih lanjut karena kalau diserahkan kepada perbankan yang perbankan tentunya apa memikirkan Bank mereka sendiri juga karena begitu banyak dalam waktu singkat yang minta restrukturisasi itu.

Jadi penyelamatan dari sektor riil dan keuangan ini benar-benar harus dilaksanakan secara komprehensif. Nah, next ini kita gambarkan tadi angkanya total pinjaman perbankan itu 5.700 triliun tadi saya sampaikan 14% US dollar sehingga angkanya 6.000 triliun. Kalau kita asumsikan bunga rata-rata 10% itu kan kurang lebih berarti 600 triliun itu dalam setahun. Kalau kita asumsi 6 bulan itu 300 triliun kalau kita asumsi 50% saja yang tidak bisa membayar bunga berarti hanya untuk bunga, pembayaran bunga itu 150 triliun untuk 6 bulan. 150 triliun untuk 6 bulan. Kalau kita hitung juga untuk pokoknya selama 6 bulan maka angka yang dibutuhkan adalah 1.500 triliun. Jadi, kalau kita tambahkan pokok dan bunga angkanya bisa mencapai 1.650 triliun. Walaupun saya bicara dengan pihak perbankan mungkin mereka bilang dengan 1.000 Triliun mereka masih bisa bertahan sampai dengan Desember dengan 1000 Triliun ini pembicaraan saya dengan bank-bank yang besar ya dan juga kalau bank-bank yang kecil memang tekanannya lebih besar. Jadi angka 1.000 Triliun ini kebutuhan yang yang memang diperlukan oleh perbankan kita dalam sampai Desember ini kurang lebih gambaran ya karena mereka sudah asumsi bahwa sampai akhir tahun ini bisa dipastikan 50% portfolio mereka akan terganggu 50%.

Berarti dari 6000 triliun kita bisa pastikan 3000 triliun, dan kebetulan ini adalah dari pihak perbankan yang bicara ke saya langsung dan ini adalah angka yang besar yang memang apa yang memang cukup membuat kita kaget juga waktu kami *running* angka ini dari Kadin mungkin dari sejak akhir Februari kemungkinannya kita juga agak kaget juga gitu. Wah nih kalau sampai memburuk waktu itu kita asumsi semakin memburuk 20% ternyata naik 30% setelah bicara dengan perbankan ini kemungkinan besar di 50%. Nah, sehingga kami memang sempat mengusulkan ke pemerintah ini kelangkaan waktu yang kami beritakan ke pemerintah bahwa dari dari misalnya kita ambil 1000 Triliun dibutuhkan oleh perbankan, 80% itu dibantu oleh pemerintah, 20% usulan kami perbankan yang 10 atau 20% juga menyediakan dana itu dari bukunya karena kita ingin mencegah supaya jangan ada penyimpanan atau *moral hazard*, tetapi pihak perbankan ngomong ke saya waduh 20% juga kelihatannya cukup berat nih untuk untuk mereka karena apa penerimaan mereka menjadi sangat sangat menurun. Hampir setengahnya tetapi secara 100% mereka tetap harus membayar bunga deposito, sehingga mereka berbicara dengan kami bahwa penyelamatan dana ini kalau menurut kami memang harus sebagian besar ini melalui Perbankan Indonesia, karena kita tidak ingin kalau ada apa-apa di pemerintahan Indonesia terjadi rush lagi. Kalau sampai ada 23 bank go yang terjadi rush itu yang kita khawatirkan bisa menimbulkan efek domino yang sangat-sangat besar, dan kami pun menyampaikan juga untuk ini belum bicara mohon maaf ini belum bicara masalah Capex atau modal kerja untuk perusahaan lagi apabila mereka ingin berjalan lagi.

Ini kita baru bicara hal untuk restruktur belum bicara masalah Capex karena kalau kita ingin supaya perusahaan-perusahaan ini kembali jalan kita harus memikirkan juga masalah Capex-nya dan berarti musti ada penambahan lagi apa modal kerja kepada pihak perusahaan-perusahaan. Pertanyaan berikutnya memang duitnya dari mana. Nah, kami mengusulkan memang ada beberapa hal ini yang kami usulkan keMenterian keuangan yang menerbitkan surat utang atau bon dengan suku bunga yang kami usulkan ke pemerintah adalah di level 1%, di level 1%. Karena ya di saat seperti ini memang saya bilang ke pemerintah di saat abnormal ini yang unprecentage yang jadinya kalau pendekatan kita adalah masih pendekatan textbook memang agak susah, karena ini belum pernah ada textbook nya selama ini. Jadi ini yang kami usulkan dengan suku bunga hanya 1%,

dkemudian dari pihak perbankan memberikan kepada UMKM, kepada dunia usaha di level 2% jadi karena kita ngerti ya bank juga perlu ada untung, kita berikan 1%.

Nah, dan ini bisa terjadi di bunga di 1% adalah apabila *boundnya* ini diserap oleh Bank Indonesia. Kalau kita mengharapkan market dari luar negeri, saya rasa saya yakin sangat-sangat berat. Ya kemarin kita tetap apa harus kasih apresiasi juga ke pemerintah masih sempat mendapat 4,3 billion US Dollar kemarin. Itu hal yang positif, walaupun mungkin rate-nya agak sedikit tinggi ya untuk mengupload *bound* kita tetapi kalau kita ke market saya yakin pasti nggak bisa. Pasti agak susah karena yang yang yang atau kalau kita mau ke IMF, ke world bank saya rasa itu makin panjang.

Market lokal juga agak berat kalau harus menyerap angka sebesar ini dan kita minta ya BI untuk apa menyerap tetapi ini tidak menggunakan cadangan devisa yang ada yang saat ini mungkin di level 122 miliar dollar, tapi dengan melakukan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat juga sudah mendengar atau paling tidak Bahasa gampangnya mencetak uang gitu, mencetak uang.

Ini sebetulnya bisa dilakukan juga apabila BI yakin sebagai kalau dulu BI dibidang sebagai the Lender of the last resource. Kalau kami bilang BI sekarang bukannya *the Lender of the last Resource*, pemerintah dan BI harus hadir sebagai *The First of the last resource* gitu. The first of the lender bukan yang terakhir tapi musti yang pertama.

Pemerintah sama BI harus step in pada saat ini tidak bisa kita serahkan ke market untuk bersaing gini udah nggak nggak bisa pemerintah harus step in di saat-saat seperti ini harus masuk gitu. Pemerintah harus ada harus hadir, dan inilah yang kita harapkan apa memang ini melibatkan semua pihak sudah ada perpunya dikeluarkan pemerintah dan tentunya masih apa nanti menunggu arahan dari DPR juga mengenai Perppu ini. Tetapi ini memang harus harus cepat karena baru kita berpacu dengan waktu tiap hari berapa puluh rate kita yang meninggal dan semakin lama memang tekanannya pada perekonomian kita ini semakin besar. Ya memang ada beberapa kekhawatiran saya tahu oleh baik oleh pemerintah juga bahwa wah kalau ada cetak uang ini bisa terjadi inflasi dikatakan seperti itu. Saya bilang iya inflasi akan naik tetapi tidak akan terlalu tinggi juga kenapa karena *demand*-nya kita juga sedang lemah, *demand*-nya kita sedang lemah.

Kemudian perusahaan juga tidak akan melakukan Capex untuk investasi jangka panjang. Kemudian pemerintah juga mengatakan oh jangan sampai duitnya ada barangnya *supply*nya nggak ada sehingga terjadi kelebihan uang yang ada di masyarakat yang sehingga mendorong inflasi. Ya, menurut saya lebih baik kita pegang duit tapi kita masih bisa cari barang daripada barangnya nggak ada duitnya juga nggak ada. Itu akan jauh lebih berat, pada saat ini ya kita memang selama ini terjadi inflasi di sekitar 3%, kami melihat inflasi kemungkinan akan naik bisa sampai ke level 10 sampai 12%, tapi *that's okay* gitu yang penting rakyat masih bisa makan, masih pegang duit, masih bisa beli walaupun harganya agak mahal. Kalau memang kejadiannya seperti itu, jadi pemerintah bilang juga ya nanti bisa terjadi apa *capital flight*. *Capital flight* disaat seperti ini ya kan BI juga bisa bikin aturan tetap diperbolehkan tapi dibikin *requirement*-nya persyaratan yang panjang itu bisa.

Kemudian *moral hazard* itu juga ya semut saya juga bilang ya semoga Apa masih ada aturan mainnya dan sekarang aturan-aturannya kan juga KSSK baik dan jelaskan semua harus apa di saat ini mengambil posisi pemerintah melupakan ego

sektoral nya, karena kalau tidak ini tidak akan jalan dan akhirnya yang menderita adalah seluruh rakyat Indonesia.

Nah, apa saya tahu mungkin dari BI mungkin meminta kita minta bunga 1% mereka bilang ya kita inginnya di atas 1% gitu ya, mungkin market. Ya, saya bilang pada saat sekarang aja dunia usaha di saat diminta untuk tidak untung besar lah saat itu new normal malah kalau perlu hanya *cost* saja. Ya masa BI mau untung juga minta membuat untung dari masyarakat yang susah juga ya dong gitu. Makanya, oleh sebab itu kami juga soal berkomunikasi juga secara terus-menerus dengan pemerintah, dengan KeMenterian, dengan OJK, dan BI untuk mencoba meyakinkan ini bahwa ini menurut kami, menurut kadin adalah solusi yang yang yang bisa dijalankan secara cepat dengan menggunakan kekuatan sendiri secara komprehensif dan ini bisa menahan apa pertumbuhan kita tidak di level minus, dan yang paling penting adalah jaringan pengaman sosial kita sehingga tidak terjadi sosial apa issue di kemudian hari.

Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terakhir, kami juga sudah mengusulkan dan kepada Bapak presiden dan KeMenterian terkait tambahan saja. Ini mengenai PPH 21 yang diperluas hampir ke seluruh industri kemarin juga sudah diperluas lagi memang ke-11, sekarang ke-8, pertama ya 1, 11, sekarang 18 industri walaupun usulan kami dibikin aja semua boleh industri kecuali tiga kecuali rokok, telekomunikasi, tower jadi semua bisa terbantu. PPH 25 tidak dibatasi hanya 30% tapi bisa sampai 100%, penangguhan iuran BPJS, juga selama 12 bulan, kemudian bisa dicairkan minimum 50% dari dana jaminan hari tua tanpa menunggu PHK atau pensiun. Kita juga sudah meminta untuk PLN untuk PLN menghapus ketentuan minimum penggunaan listrik PLN terhadap industri kami minta itu juga. Kemudian kita minta streamline aturan karantina daerah untuk meminimalkan masalah-masalah logistik dan juga untuk mempercepat reformasi kebijakan dan simplikasi kebijakan dan reformasi birokrasi nasional dan daerah pada saat ini yang menyangkut perpajakan, ekspor, investasi, dan yang lain-lain.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada seluruh Anggota dewan yang terhormat persis pemaparan ini selesai dengan suara adzan yang saya baru dengar dari sebelah rumah saya.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Rosan Roeslani yang telah memberikan pemaparannya yang sangat menarik untuk kita cermati dan nanti sebelum ke Apindo sebelum kita shalat dzuhur juga, apakah dari Kadin ada yang ingin menyampaikan juga Pak Rosan? Apakah dari asosiasi atau Pak Raden mungkin ada pengalaman dulu di BPN mungkin kalau ada dari Kadin sebelum kita *break*.

(Ya saya persilahkan kepada teman-teman Kadin. Ada Pak Raden, ada Bu Sinta, ada Pak Anton, Pak Beni, silakan saya persilakan, Pak Joni.)

(Pak Raden tuh)

(Pak Raden yang udah pengalaman buk ya)

(Pak Raden, Pak Raden dong bicara saya pengen denger)

Nggak ada Pak Raden

(Mungkin shalat kali)

Oke, jadi apakah kita *break* 15 menit shalat dulu. Atau mau ganti-gantian shalatnya. Pak Rosan mungkin mau shalat juga ya?

(Silakan)

(Ya pak)

Ya kita shalat *break* 15 menit, kita shalat karena di rumah kan cepet mungkin. Mungkin yang tidak, yang lain mungkin bisa makan siang, kita *break* 15 menit ya shalat ya, setuju?

(Setuju pak Ketua)

Oke, *break* 15 menit.

(Utamakan Tuhan dulu Ketua, utamakan Tuhan dulu)

Oh ya siap biar kita selamat semua ya, makasih Bu Indah.

(RAPAT DISKORS)

Sudah ada Pak Rosan?

Skors saya cabut dulu ya.

(SKORS DICABUT)

Oke silakan pak Rosan kalau ada yang lain dari Kadin?

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Kalau dari teman-teman Kadin ada yang mau menambahkan saya persilakan. Mungkin udah kerangkum semua di saya kali Pak Ketua yang terhormat.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Udah kerangkum semua, baik. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi pada Ketua umum Kadin Indonesia, Pak Rosan Roeslani yang telah memberikan pemaparannya yang luar biasa. Sangat bermanfaat bagi kita semua.

Selanjutnya kami persilakan dari Apindo. Pak Hariyadi sudah hadir.

APINDO (HARIYADI):

Terimakasih Mas Dito.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Kepada Pimpinan Komisi XI dan juga rekan-rekan asosiasi semua Pak Mas Rosan

Saya rasa tadi udah lengkap banget tuh Mas Dito, jadi kayaknya mestinya saya nggak ngomong lagi ya udah semuanya lengkap. Saya mencoba untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh mas Rosan tadi. Saya coba tambahkan beberapa yang mungkin tadi terlewatkan oleh mas Rosan ya.

Saya rasa nggak berpanjang lebar aja jadi mengingatkan saja bahwa kalau skenarionya Bu Sri Mulyani kan kita skenario terburuknya di minus 0,14% ya tapi kalau Bank Dunia memperkirakan kita di minus 3,5%. Ya kita tidak tahu nanti akan ke berapa minus kita dan di apa Indonesia menurut bank dunia yang paling terpukul paling berat adalah di sektor jasa, lalu di *manufacturing*, baru di pertanian. Ini yang paling terdampak nanti.

Lalu, ini yang skenarionya Ibu Sri Mulyani ya paling apa yang paling sangat berat itu di minus 0,4 tapi Bank Dunia bilang minus 3,5. Ini juga dari from manufacturing index ini juga terlihat sudah *drop* ininya angkanya, indexnya sudah di 45 dari sebelumnya di bulan Februari itu masih 52 sekarang udah drop sekali.

Demikian juga untuk impor bahan baku penolong dan barang modal juga signifikan turunnya. Kita bisa lihat dari datanya BPS, pada bulan Maret 2020 dan ini adalah pada dampak yang paling kelihatan melengkapi tadi mas Rosan ya untuk retail ini juga sudah menunjukkan minus. Jadi penurunan yang cukup besar minus 5,355 ini adalah sesuatu hal yang apa yang anomaly sekali, yang berbeda sekali dengan kondisi normal kalau sudah bulan Ramadhan memasuki Ramadhan satu bulan sebelum ramadhan trennya itu harusnya meningkat ini malah semakin turun.

Nah ini tadi Mas Rosan juga udah menyampaikan mengenai dampak ke pariwisata. Saya mungkin menambahkan saja potensi dari kehilangan pendapatan per April. Itu kita perkirakan kita akan kehilangan pendapatan dari wisatawan mancanegara itu 4 miliar atau setara dengan 60 triliun dimana perhitungannya ini adalah proporsional terhadap pendapatan devisa tahun lalu, sebesar 17,6 miliar dollar, dan dari sektor hotel sendiri ini akan terjadi akan terjadi potensi kehilangan penjualan itu sebesar 30 triliun, dan di sektor restoran itu adalah 40 triliun. Ini adalah juga mengacu kepada kalau sektor hotel itu adalah mengacu kepada sekitar 720.000 kamar hotel bintang dan non bintang. Dengan *occupancy* rata-rata sekitar 60 sampai 70% itu potensi hilangnya sedemikian, demikian juga restoran, dan tanggal per tanggal 24 April yang sudah tutup hotel itu ada 1674 dan 500 restoran. Ini adalah yang mereka melaporkan. Jadi kalau termasuk yang tidak melaporkan itu jumlahnya sangat signifikan.

Otomotif tadi Mas Rosan sudah menyampaikan, saya tidak perlu bahas lagi. Nah sektor lainnya ini melengkapi tadi juga. Jadi untuk elektronik ini juga sudah menyampaikan bahwa mereka itu pasar domestiknya sudah turun hingga 70% ini adalah data sampai dengan tanggal 15 April yang lalu dan tekstil ini data sampai kemarin tanggal 26 April, ini utilitasnya adalah 14% dan sudah merumahkan lebih dari 70% pekerjanya. Jadi ini sangat dinamis pertengahan April yang lalu dia utilitasnya masih 30%, tapi sekarang sudah 14%.

Tadi sektor makanan minuman juga sudah disampaikan oleh Mas Rosan, saya hanya menyampaikan bahwa ternyata di sektor makanan minuman ini yang kita pikir adalah mereka yang cukup tahan ternyata juga mengalami penurunan yang signifikan karena penjualan mereka terbesar itu ternyata ke non pasar modern yaitu mengkontribusikan sekitar 70% dari segmen pasar mereka dan mereka sudah merumahkan dengan membayar gaji sekarang ini sudah sekitar 50%, dan untuk sepatu alas kaki ini juga sudah melaporkan mereka turun sampai dengan 70%. Data per tanggal 20 April dan salah satu pabrik terbesarnya mereka juga sudah resmi menyatakan PHK 12.000 pekerjanya dan industri ban ini juga sudah melaporkan produksinya sudah dibawah 30% karena turunnya pasar ekspor dan lemahnya industri otomotif domestic.

Tadi pak, mas Rosan juga sudah menyampaikan ya ada apa Toyota sudah menghentikan produksinya dan juga Suzuki dan lainnya jadi ini memang ada korelasi ke industri *supply chain*nya. Jadi tidak hanya industri ban tapi juga *spare part* juga mengalami hal yang sama, dan untuk retail makanan minuman tadi sudah dilaporkan oleh Pak Rosan ya, turunnya sampai 90%. Lalu INAKA mengupdate juga bahwa sejak tanggal 24 April itu tidak ada pesawat yang boleh beroperasi ya karena adanya Permenhub Nomor 25. Jadi ini tentu juga akan sangat memukul sektor perhubungan udara, dan di perkebunan yang juga terpukul berat adalah di karet. Karet ini juga mengikuti penurunan terhadap industri. Industri di hilirnya yaitu otomotif yang juga turunnya besar. Nah ini juga sektor perunggasan jadi laporan yang baru masuk kepada kami, sektor ini mengalami penurunan permintaan khususnya dari sektor hotel dan restoran. *In line* dengan laporan yang sebelumnya dengan pasar tradisional itu 40%. Walaupun ada kenaikan di pasar modern secara keseluruhan terjadi penurunan yang sangat besar. Sedangkan yang memprihatinkan bahwa harga jual itu ternyata dibawah daripada harga biaya produksi jadi harga jualnya itu sekarang rata-rata sekitar 9 ribu per kg di bawah biaya produksi sebesar 15.000 per kg. Jadi memang sektor perunggasan ini adalah yang juga sangat terpukul karena menyangkut juga peternak mandiri atau peternakan dari non integrator.

Nah, dan di sektor perikanan ini juga mengalami penurunan ekspor yang besar karena negara tujuan ekspor mengalami penurunan permintaan. Sebenarnya Cina itu sudah mulai ada permintaan import namun terkendala dengan tidak adanya logistik atau pesawat kargo yang terbang ke Cina, dan pasar domestik agak sedikit terbantu untuk produsen ikan olahan dalam kemasan atau apa ikan sarden itu ya yang dibeli untuk program bansos. Dan yang di domestik yang juga paling terpukul adalah peternak ikan lele karena sebagian besar dari penjual, pedagang pecel lele itu juga pulang kampung dan karena adanya penurunan permintaan dari masyarakat dan juga sebetulnya juga penurunan di pasar tradisional.

Sedangkan di sektor perbankan dan jasa keuangan tadi mas Rosan juga udah menyampaikan. Hari ini kita juga masih belum pasti bagaimana dengan skenario pemerintah untuk menopang sektor ini agar dapat bertahan. Mengingat mayoritas perusahaan sektor riil sudah meminta penjadwalan hutang sedangkan perbankan sendiri sudah menghentikan penyaluran kredit dan mereka harus membayar bunga terhadap deposit dan penabungnya.

Nah kalau di sektor informal tadi juga Mas Rosan juga menyampaikan bahwa intinya di UMKM ini memang juga sudah mulai menyampaikan mereka sudah dari bulan April ini sudah daya tahannya sudah habis ya. Hampir semua sektor dan upaya-upaya untuk mengkonversi menjadi penjual apa pembuat alat pelindung diri

APD buat masker itu memang dilakukan tapi itu tidak apa sangat kecil lah apa untuk menopang mereka dan itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa industri yang terkait dengan tersebut.

Nah ini adalah survei dari GAPMMI, gabungan perusahaan makanan minuman yang menyampaikan bahwa mereka juga secara garis besarnya mereka juga menghadapi kendala yang serius menghadapi kondisi yang berkepanjangan dari pandemi ini. Implikasi terhadap ketenagakerjaan kami mendapatkan juga konfirmasi dari Ibu Ida Fauziah yang menyampaikan bahwa per tanggal 15 April yang lalu, terdapat 1,5 juta pekerja yang terimbas virus ini. Dimana 10% nya itu sudah PHK dan 90% nya itu adalah sudah dirumahkan dengan dicutikan diluar tanggungan perusahaan, atau dibayar upahnya secara tidak penuh dan ini adalah pada tanggal 7 April diberikan ininya lebih detail sebetulnya mengenai komposisi perusahaan yang sudah melaporkan melakukan PHK dan juga merumahkan karyawannya. Mungkin kalau boleh saya share disini kalau untuk itu sector hotel dan restoran itu boleh dibilang 95% itu sudah melakukan kondisi apa mereka lebih kepada merumahkan atau mencutikan di luar tanggungan perusahaan. Jadi sektor pariwisata ini yang paling besar pengaruhnya.

Menyangkut masalah nilai tukar, kinerja investasi, dan mitigasi risiko, dapat juga kami sampaikan bahwa permasalahan dari pelemahan rupiah terhadap US Dollar terakhir ini juga secara langsung juga tetap memperparah juga kondisinya disamping memang terakhir sekarang ini memang sudah tidak ada permintaan tapi itu juga mengakibatkan sektor riil juga mengalami kondisi yang berat yang terkait dengan yang masih melakukan apa import bahan baku dalam mata uang asing, dan kami juga berharap bahwa memang kedepannya Bank Indonesia akan mendorong juga untuk melakukan converting conversion dari pemakaian yang terlalu besar di US Dollars kepada mata uang-mata uang yang lain dan ini sebetulnya juga sudah disampaikan oleh kami kepada bank sentral. Untuk khususnya dengan China tapi sayangnya sampai hari ini kelihatannya apa pembahasan dengan bank sentral China masih belum banyak mengalami kemajuan.

Lalu berikutnya adalah dampak dalam UMKM saya rasa tadi sudah cukup jelas juga ini hampir sama dengan yang di sektor informal Bapak Ibu sekalian yang intinya bahwa kondisi apa Covid itu sendiri dan ditambah dengan adanya PSBB, ini memang sudah memukul yang paling dalam untuk sektor UMKM. Saya tidak sampai di sini saya langsung saja. Tentang PSBB dan inisiatif perusahaan untuk perlindungan karyawan karena ini juga di dalam pertanyaan yang disampaikan kepada kami dari Komisi XI. Dapat kami sampaikan bahwa Kemenperin melalui surat edaran nomor 4 dan nomor 7 itu sebetulnya sangat mendukung berlangsungnya aktivitas industri yang memang dikecualikan. Ada 11 sektor yang dikecualikan di PSBB mulai dari yang terkait dengan industri untuk mendukung sektor kesehatan, sampai dengan yang untuk kebutuhan sehari-hari, namun demikian didalam pelaksanaan di lapangan itu kelihatannya masih tidak sinkron antara pandangan ataupun konsep daripada pemerintah pusat dalam hal ini KeMenterian Perindustrian dengan pemerintah daerah. Nah, hal ini yang menurut pandangan kami sangat tidak apa tidak *mensupport* juga kondisi yang terjadi di lapangan karena saat ini sebetulnya beberapa industry itu memang masih berjalan memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan eksport.

Nah ini sudah diberikan juga apa izin, izin operasional dan mobilitas sebetulnya. Nah, ini kami menyampaikan kalau dari sektor riil kami sangat

mendukung surat edaran dari KeMenterian Perindustrian ini dan kami berharap ada sinkronisasi pandangan dengan pemerintah daerah. Untuk hal-hal yang lain masalah perlindungan karyawan pada intinya adalah kita menekankan pada keamanan, kesehatan, dan kesinambungan usaha dan saat ini juga hampir semua perusahaan yang masih beroperasi telah melakukan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh KeMenterian Kesehatan. Jadi sebetulnya di lapangan tidak ada masalah di perusahaan. Mungkin yang masih ada masalah adalah terkait dengan transportasi umum karena ada sebagian apa perusahaan yang sarana penjemputan itu tidak sampai bisa sampai rumah daripada karyawannya tapi pada titik kumpul. Nah dari rumah ke titik kumpul inilah yang sebetulnya banyak disorot oleh media karena dianggap masih terjadi penumpukan di sebagian terminal di beberapa daerah.

Ya dan juga kami perlu sampaikan mengenai dampak POJK nomor 11 2020. Pada prinsipnya kami sangat mendukung secara positif, stimulus restrukturisasi kredit ini melalui POJK 2000, nomor 11 tahun 2020 namun di lapangan kami masih menghadapi kendala karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Rosan bahwa situasinya itu adalah untuk bank yang mempunyai likuiditas yang terbatas itu bagi mereka sulit sekali untuk bisa mencapai titik temu dengan debiturnya secara debiturnya itu betul-betul usahanya sudah berhenti. Secara berturut-turut tidak ada apa *in flow, cash in flow*nya tidak ada. Nah, ini juga kita berharap ada penyelesaian yang lebih tepat. Ini mungkin ada terkait dengan stimulus untuk sektor jasa keuangan sendiri yang saat ini kami belum melihatnya untuk menopang mereka. Tanpa didukung sektor jasa keuangan ini tentunya juga akan menjadi problem bagi penyelesaian penjadwalan kredit di sektor riil.

Rekomendasi apindo Bapak Ibu sekalian jadi ada beberapa yang ingin yang kami sampaikan kepada pemerintah yaitu tadi mengenai masalah JHT sudah disampaikan juga oleh Mas Rosan yang pada intinya adalah didalam pencairan JHT ini ada dua kondisi yaitu kondisi pertama adalah dimana pekerja itu sudah berhenti bekerja atau ter PHK itu dia bisa mencairkan seluruhnya, tapi kalau dia belum ter PHK. Dia bisa mencairkan hanya 30% dari jaminan hari tuanya setelah masa kepesertaannya itu 10 tahun. Nah, di dalam usulan kami itu adalah kami meminta kepada pemerintah agar pencairan dana jaminan hari tua di BPJS ketenagakerjaan ini bisa dilakukan oleh pekerja yang tidak ter PHK. Jadi kalau dia dirumahkan dan status hubungan kerjanya tidak ter PHK, dibolehkan untuk mengambil uang tabungannya, dan perlu kami sampaikan disini juga kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di sector riil itu boleh dibilang yang melakukan PHK itu jumlahnya relatif kecil karena kalau kita PHK itu harus menyediakan uang pesangon yang mana tidak mungkin dapat disediakan pada kondisi seperti hari ini, dan yang selanjutnya juga rekomendasi kami adalah pembayaran THR. Disini kami mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri koordinator perekonomian dan juga Menteri Tenaga Kerja yang intinya bahwa bagi perusahaan yang tidak dapat membayar THR secara penuh, maka diperbolehkan untuk membayar secara cicilan hingga akhir tahun 2020 namun bagi perusahaan yang tidak mampu membayar sama sekali karena *cash flow*-nya sangat sudah kering dapat ditunda hingga akhir 2020.

Nah, ini betul-betul kami sangat berharap dukungan pemerintah karena kami masih melihat statement pemerintah sampai dengan pertengahan April itu bahwa perusahaan harus wajib membayar. Yang mana itu sangat sangat tidak mungkin kondisinya kalau dipaksakan nanti akhirnya terjadi adalah perselisihan di lapangan. Jadi ini yang juga kami berharap ada *soft lending* melalui surat edaran ataupun juga

pemberitahuan dari pemerintah yang kita usahakan intinya adalah dibicarakan secara bipartite.

Nah lalu yang berikutnya adalah usulan kami adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan, disini untuk dapat dibebaskan sementara khususnya adalah terkait dengan sampai dengan ekonomi ini pulih atau paling tidak sampai dengan akhir tahun. Kalau kami mengusulkan adalah dalam jangka waktu 12 bulan tapi nanti kita lihat kondisinya.

Larangan mudik lebaran alhamdulillah sudah disetujui untuk tidak tidak diberlakukan untuk diberlakukan larangan mudik ini karena dari segi teknis rekan-rekan di organda sudah menyampaikan bahwa ini tidak akan efektif kalau mudik itu tidak dilarang karena secara teknis di pengangkutan itu akan sangat berisiko sekali, dan mengenai listrik dan gas ini juga kami berharap bahwa ketentuan minimum pembayaran untuk penggunaan listrik ini dapat dihapuskan jadi yang dibayar itu adalah sebatas dari apa yang digunakan, karena saat ini kami di industri itu masih dikenakan minimum pembayaran yaitu antara 40 jam hingga 230 jam per bulan, dan juga kami berharap bahwa tarif listrik juga dapat diturunkan per kilowatt/hournya dan juga awalnya untuk gas per mbtu nya karena harga minyak dunia sedang turun.

Untuk pra kerja ini kami sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah tapi kelihatannya pemerintah tetap akan menjalankan dengan desain sebagai sebagai insentif untuk meningkatkan kompetensi di mana menurut kami saat ini yang paling diperlukan adalah merupakan bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial bagi karyawan-karyawan yang saat ini mengalami permasalahan tapi kelihatannya pemerintah tetap menerapkan itu sebagai insentif kompensasi, dan juga kita merekomendasikan untuk impor yaitu terkait dengan import ini kita berharap bahwa secara menyeluruh dari hulu hingga Hilir kita harapkan terjadi konversi untuk diambil atau menggunakan seluruhnya produk dari dalam negeri. Dan untuk program bantuan social, ini juga kami berharap bahwa bansos-bansos itu hendaknya membeli atau menyerap hasil produksi UMKM atau peternak, nelayan, dan petani jadi misalnya adalah untuk pemerintah membeli ayam dari peternak mandiri untuk dimasukkan dalam paket bansos pangan.

Ini yang menarik adalah di sektor perikanan. Perikanan itu karena bansosnya membeli ikan dalam kaleng itu juga sangat membantu untuk industri pengolahan ikan dan kita berharap juga untuk ayam ini juga bisa dimasukkan dalam paket bantuan sosial yang dibeli oleh pemerintah sehingga peternak mandiri atau peternak apa yang mereka itu dari kalangan menengah atau UMKM itu dapat terselamatkan, dan kita berharap juga implementasi POJK ini dapat didukung sepenuhnya oleh perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena saat ini tadi telah melaporkan telah masih sangat sangat berat untuk bernegosiasi dengan mereka karena mereka juga harus memperhatikan dan mementingkan kondisi banknya sendiri atau perusahaan sendiri.

Nah lalu berikutnya juga kami mengusulkan agar diadakan pelonggaran aktivitas ekonomi di zona hijau. Jadi perlu kita lakukan penyekatan yang lebih ketat sehingga apa yang zona merah itu memang harus diawasi tapi zona hijau juga jangan sampai apa jangan sampai juga mati gitu karena kami melihat sekarang ini hampir semuanya mengalami kendala yang sama dan itu kami mohon juga bantuan dari Bapak Ibu di Komisi XI untuk juga dapat melihat masalah ini secara lebih bijaksana karena kalau semuanya kondisi apa aktivitas ekonomi di semua daerah dijadikan sama, menurut saya juga tidak akan membuat hasil yang lebih baik.

Terakhir dari usulan kami mungkin sama dengan usulan yang disampaikan oleh Mas Rosan tadi. Perluasan stimulus dan pengaman jaringan sosial sebagaimana kita ketahui laporan dari hampir seluruh sektor riil itu menyampaikan bahwa kemampuan cash flow mereka itu mayoritas hanya bisa bertahan sampai dengan Juni. Jadi kalau sampai dengan Juni kondisi ini masih berlangsung terus, maka dapat di apa dapat diperkirakan terjadi collapse. Jadi sector kita akan collapse karena tidak mungkin sama sekali mereka mempunyai dana tunai untuk membayar karyawannya.

Untuk itu kami sudah menanyakan juga kepada Ibu Menteri Keuangan kemarin hari Jumat mengenai antisipasinya, namun demikian kami belum mendapatkan suatu jawaban yang cukup jelas begitu gimana rencananya nanti. Nah, mungkin di dalam kesempatan ini dengan Komisi XI dapat juga nanti kita mulai membicarakan apa yang akan terjadi karena bulan Juni itu tinggal dua bulan lagi. Nanti berikutnya ini seperti apa kalau tidak dilakukan langkah-langkah ini akan menjadi masalah, dan salah satu juga yang kami lihat bahwa permasalahan perluasan stimulus dan jarring pengaman sosial ini juga terkait dengan gugatan Perpu Nomor 1 tahun 2020 oleh beberapa elemen masyarakat KNK. Sehingga ini membuat pemerintah juga gampang untuk mengambil kebijakan efektif, dan juga trauma atas kasus BLBI juga membuat Bank Indonesia terlihat sangat berhati-hati menyikapi usulan kuantitatif easing.

Bapak dan Ibu sekalian kondisi daripada pandemi ini memang berbeda sekali dengan kondisi yang terjadi krisis-krisis ekonomi yang lalu. Kalau krisis ekonomi yang lalu bahkan great depression tahun 1929 di Amerika itu yang bermasalah hanya ekonominya. Jadi kalau ekonomi yang bermasalah itu dengan stimulus dengan quantitative easing itu dengan mudah bisa kita perkirakan terjadinya peningkatan agregat demand sehingga kekuatiran terhadap kenaikan inflasi dan sebagainya itu bisa diredam disana, namun dalam kasus pandemi ini tidak akan terjadi agregat demand karena semua orang masih takut untuk melakukan ini kemungkinan tidak akan terjadi agregat demand karena semua orang masih takut untuk melakukan aktivitas. Ini juga yang perlu kita juga bicarakan secara bersama-sama mau sampai kapan kalaupun kita melakukan quantitative easing mau sampai seberapa banyak dan lain sebagainya.

Tentunya ini pilihan-pilihan juga yang harus kita kita cermati, Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya untuk menghindari apa keruntuhan atau collapsing dari ekonomi kita menjadi lebih buruk lagi dan juga yang sangat kami khawatirkan adalah terjadinya gejolak sosial yang akan merugikan kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin penutup dari kami adalah apapun yang akan kita ambil memang kita harus mengambil langkah-langkah itu secara cepat dan kondisi yang saat ini kami melihat kami mohon maaf kami memandangnya dari sisi luar saja tapi kami melihat memang dari pemerintah sendiri tidak siap untuk melakukan apa misalnya pun kita disetujui misalnya quantitative easing misalnya. Lalu, bagaimana target mana yang harus dilakukan besarnya seperti apa secara teknis administrasi bagaimana itu sama sekali belum belum di bicarakan. Saya hanya mengacu kepada masalah kartu pra kerja bagaimana saat ini untuk target 5,6 juta orang itu kami hanya mengambil sampel random saja karena saya juga Ketua perhimpunan hotel dan restoran se-Indonesia, dimana saya sendiri mengikuti betul pengumpulan data dan memang data yang kami sampaikan itu adalah data yang sudah clean and clear ya. Sudah kita lakukan data cleansing tapi itu juga belum membuat jaminan bahwa orang yang data yang sudah kita verifikasi kita filter itu bisa masuk kedalam

kelompok yang menerima kartu pra kerja karena itu akan dibuat open registration. Semua orang bisa masuk gitu.

Nah, bagaimana kita juga nanti harus melihat apabila kita akan memperluas stimulus dan jaring pengaman sosial ini tanpa kita melakukan persiapan-persiapan baik itu menentukan targetnya secara cermat maupun juga teknisnya itu bagaimana supaya tidak ada yang juga memanfaatkan kondisi ini artinya ada penumpang gelap yang memanfaatkan situasi yang chaos ini. Hal-hal ini yang merupakan menurut pandangan kami sampai hari ini kami belum melihat adanya pembahasan masalah. Yang ada itu lebih banyak kepada mohon maaf kalau diisi pemerintah bertahan kepada prinsip-prinsip yang mereka yakini gitu.

Jadi ini juga akan sulit, jadi kalau nanti kita akan bicara lebih banyak akhirnya debat kusir. Jadi tanpa melihat bagaimana kita mengambil langkah-langkah ini karena yang tadi kami sampaikan kondisi krisis ini berbeda dengan krisis yang lain. Kemungkinan besar tidak ada agregat demand, berarti apa artinya artinya kita akan menopang kehidupan masyarakat itu dengan apa model-model seperti quantitative easing tadi itu. Dengan memperlebar uang beredar yang ada di masyarakat ini juga harus kita lihat makanya tadi kami sampaikan juga misalnya seperti perluasan zona hijau. Jadi zona hijau ini kita harus melakukan penyekatan Pak Bapak Ibu sekalian jadi kita tidak bisa seperti ini. Mungkin dari daerah-daerah yang relatif kecil tidak apa tapi pelan-pelan nanti zona hijau ini kita perbesar. Bahkan beberapa negara juga sudah menyampaikan bahwa mereka juga akan menutup negaranya seperti Taiwan itu udah menyatakan mereka menutup negaranya sementara waktu untuk tidak menerima karena mereka mau ingin menggerakkan ekonomi domestiknya.

Mungkin demikian Mas Dito dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau agak berkepanjangan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Ya, Pak Hariyadi yang telah, Pak Hariyadi Sukamdani Ketua umum Apindo yang telah memaparkan presentasinya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah pendalaman pada Anggota Komisi XI DPR-RI untuk memberikan pertanyaan atau komentar-komentar apa yang telah disampaikan oleh Ketua umum Kadin Indonesia, Pak Rosan Roeslani maupun Ketua umum Apindo Pak Hariyadi Sukamdani.

Baik, pertama kami persilahkan kepada fraksi PDIP kapoksinya Pak Dolfie, ada Pak Dolfie?

(Selamat siang pak Ketua. Saya ditugaskan oleh Pak Dolfie.)

Oh iya silakan.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Pak, selamat siang pak Ketua dan Anggota Komisi XI, selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tabah menjalani dalam hal ini kami memberikan tugas yang pertama kali Pak

Andreas masih ada Pak Andreas nggak? Pak Andreas, oh ya silakan Pak Andreas. Silakan Pak Andreas lanjut pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Baik. Terima kasih selamat siang untuk Kadin beserta tim Apindo, Pimpinan Komisi XI dan rekan-rekan Komisi XI dan ini yang dijelaskan oleh baik Kadin maupun Apindo itu sangat menarik, bahwa tekanan pada sektor UMKM dan sektor informal yang pada tahun-tahun krisis 98 dan 2008 tidak terkena dampak sekarang sangat terkena dampak dan kalau kita lihat jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor ini tadi disebutkan hampir 97% dan bahkan kontribusi terhadap PDB adalah 56%, dan kalau kita lihat tadi kadin itu menghitungnya berdasarkan dari kredit yang disalurkan oleh perbankan. Yang hampir sekitar 1.100 triliun, mungkin yang perlu kami sangat sependapat bahwa sebetulnya sector usaha ini adalah saat ini yang paling rentan menghadapi krisis ini, tetapi kami mohon dipertajam dengan data yang ada karena kami kesulitan Pak Rosan untuk menemukan jumlah 62 juta UMKM ini yang tadi disebutkan oleh Pak Rosan tadi yang 1.000 triliun itu berapa jumlahnya karena juga ada juga yang mendapatkan ultra mikro itu yang disalurkan melalui pusat investasi pemerintah baik itu melalui pegadaian maupun juga melalui bahana, ultra mikro tetapi juga ada yang di bank perkreditan rakyat bahkan diluar itu.

Jadi sebetulnya bentuk paket program yang diluar perbankan itu apakah Kadin ini mempunyai usulan ya ini karena tentu Kadin dalam hal ini membawahi juga usaha UMKM yang tadi katanya jumlahnya sangat besar. Memang jumlah ini patut juga diperdebatkan karena kalau 62 juta berdasarkan data bank data dari Biro Pusat Statistik, BPS itu kalau rata-rata itu menyerap 2 sampai 4 orang aja itu sebetulnya penyerapan tenaga kerjanya rendah. Hampir semua orang sebetulnya terserap oleh tenaga kerja ini.

Nah, bagaimana sebetulnya peta dari pada UMKM ini sehingga dengan demikian pada saat nanti kami menyusun atau merekomendasikan mengenai kebijakan fiskal untuk membantu sektor UMKM ini bisa lebih tepat sasaran. Ini karena yang yang ada sekarang ini adalah program bantuan sosial itu terutama yang untuk miskin tetapi untuk kategori kelangsungan usaha UMKM di luar baik di dalam sektor perbankan maupun yang diluar sektor perbankan ini mungkin yang perlu disampaikan kepada kami.

Terus yang kedua, mengenai tadi mekanisme recovery bound tadi dikatakan bahwa toh walaupun harus inflasi ya 10 sampai 12% tapi tadi belum dijelaskan juga oleh Kadin dampaknya terhadap nilai tukar. Kalau seandainya inflasi tersebut sebesar itu karena di satu sisi tadi juga belum disinggung itu adalah masalah bagaimana mengenai posisi utang luar negeri swasta. Yang yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap dampak daripada nilai tukar tersebut.

Yang ketiga itu adalah tadi dari usulan 1.600 triliun itu mohon asumsi siklus dari penyelesaian permasalahan kesehatan Covid-19 sendiri, karena tentu biaya krisis sangat tergantung kepada lamanya daripada krisis tersebut. Pemerintah sendiri sudah mempunyai skenario yang berat dan sangat berat. Tentu di dalam hal ini kalau memang Covid ini selesai benar di bulan Juni itu bagaimana kalau lebih bagaimana. Ini terutama kaitannya dengan tadi, pola *recovery* yang akan muncul. Apakah pola *recovery* C, U, atau bahkan W atau *double you* ini akan sangat

tergantung bagaimana sebetulnya dari dunia usaha memandang proses daripada *recovery* ekonomi. Apakah betul nanti katakanlah begitu ini selesai bulan Juni, kemudian ekonomi kita tahun depan bisa langsung tumbuh seperti yang direncanakan yakni 4,24% yang ada didalam kerangka ekonomi makro.

Jadi hal-hal ini yang mungkin perlu diperjelas karena kami sangat mendukung bahwa pemulihan dunia usaha ini sangat penting tapi kalau tadi 1.000 triliun yang disampaikan untuk hanya perbankan, padahal di pemerintah sekarang menyampaikan 150 triliun itu juga tentu bagaimana pembagian antara sektor riil dan sektor perbankan, karena yang kita inginkan adalah perbankan bisa membantu sector riil tetapi perbankannya sendiri tidak ikut menjadi sakit.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik, terima kasih Pak Agung Rai, Pak Gusti Agung Rai dan Pak Andreas. Selanjutnya kita seperti biasa aja kali ya dari Partai Golkar silakan Pak Mekeng. Pak Mekeng ada?

F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG)

Baik, makasih Ketua.

**Temen-temen Komisi XI yang saya hormati
Pak Rosan beserta jajaran pengurus Kadin
Pak Haryadi beserta jajaran yang saya hormati**

Ya, pertama-tama saya mengucapkan menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Memang krisis kali ini memang krisis yang berbeda dengan krisis sebelum-sebelumnya. Terakhir kita krisis yang besar tahun 98, setelah itu 2008 itu krisis di luar pada sampai *subprime mortgage* dan kita nggak terlalu terpengaruh sebetulnya, karena perbankan kita waktu itu sudah lebih governance-nya lebih banyak dan tidak terlalu banyak investment di surat-surat berharga di luar negeri.

Kalau kita melihat semua penjelasan tadi dari Pak Rosan kita ini benar-benar satu-satunya yang kita harapkan adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini APBN, tapi kita semua tahu bahwa APBN kita ini sebetulnya sudah terkotak-kotak yang berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti Pendidikan 20%, Kesehatan 5%, DAU 26%, dana desa 10% dari DAU, dan sudah banyak kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah. Itu constriane daripada APBN kita yang kita tidak mungkin melanggar itu. Apalagi Undang-Undang Dasar '45 tidak mungkin kita rubah seenaknya.

Ada tinggal beberapa celah yang bisa kita lakukan misalnya kita melakukan renegotiasi pemerintah ya renegotiasi terhadap hutang-hutang kita. Baik yang bilateral, maupun yang multilateral itu harus dilakukan supaya ada *cashflow* di

dalam APBN kita untuk tidak dulu menunda dulu pembayaran. Seperti swasta meminta relaksasi kepada pemerintah, seyogyanya pemerintah meminta relaksasi kepada kreditur-kreditur di luar negeri. Itu salah satu yang bisa kita lakukan.

Yang kedua yang saya ingin tanya kepada teman-teman di Kadin. Ini uang-pengusaha Indonesia yang kaya raya ini diluar negeri masih banyak nggak. Khususnya orang-orang yang pinjem duit di bank-bank pemerintah, bertriliun-triliun untuk memproduksi hasil produksinya terus diekspor ke luar yang masih parkir di luar negeri masih banyak nggak? Kita jangan lompat dulu kepada apa cetak uang, cetak uang sebaiknya jangan dipaksakan juga kepada BI untuk beli, karena BI tentunya ada rasio-rasio yang mereka harus perhatikan. Kalau BI sendiri nanti kita paksakan dan akhirnya BI sendiri tidak sehat, ini negara tinggal ambruk. Nah, uang-uangnya Pak Rosan, uang-uangnya Pak Sihar Sitorus, uang-uangnya yang konglomerat-konglomerat itu bawa masuk dulu. Uangnya Pak Dito juga banyak di luar negeri, betul nggak Pak Dito? Lah itu beliin dulu obligasi-obligasinya karena uang-uang itu sendiri sebetulnya banyak. Itu sangat bisa mudah di tap adalah kita melihat debitur di bank-bank pemerintah aja. Yang mereka pinjem duit baik itu rupiah maupun dollar, abis itu mereka produksi, mereka jual ke luar negeri yang masuk itu berapa persen dari yang hasil mereka jual. Sebetulnya itu aja bisa masuk ke dalam sini, mereka yang membeli itu obligasi- obligasi yang diterbitkan oleh swasta atau oleh pemerintah? Kita kalau langsung main ke *jump to conclusion* cetak uang, kita ini berbeda dengan Amerika. Amerika mata uangnya ya dollar, jadi mereka mencetak uang ya it's dollar, kalau kita? Tadi Pak Andreas bilang, itu currency kita gimana? Kalau mata uang kita naik ke 20.000, itu jerit semua kita.

Nah ini semua seharusnya sebelum kita meminta kepada APBN, saya berharap teman-teman Kadin pun juga harus bisa kumpulin. Pak Rosan kumpulin seluruh Anggotanya apa pengusaha-pengusaha itu. Nasionalisme ini yang kita minta. Kembalikan dulu itu uang-uang yang diluar negeri ke dalam negeri. Faktanya Bapak-Bapak, waktu kita membahas Undang-Undang Tax Amnesty itu kan disampaikan *by name by phone* akan masuk berapa 11.000 triliun. Apa Bu Indah? *By address, by name, by phone*, bilangannya mau masuk 11.000 triliun kan yang masuk kan enggak banyak.

Terus kita lengkapi lagi dengan Undang-Undang Automatic (suara tidak jelas) *of information* dari Perppu itu, faktanya kan nggak masuk juga karena apa karena masih banyak uang pengusaha kita di Singapura atau di tempat lain pada saat dia harus bayar denda 3% atau apapun itu bank di sana menawarkan bahwa disana dendanya nggak usah bayar tetep taruh di sini. Orang kita tetep taruh uangnya di sana. Jadi kita harus juga berpikir seberapa besar kapasitas? Kalau APBN ini digenjot terus untuk menerbitkan obligasi, hutang. Kapasitas fiskal dari APBN itu tidak akan bisa membangun bangsa ini. 20% Kesehatan, 5% eh 20% Pendidikan, 5% kesehatan, 26% DAU, 2,6% dari dana desa, 10 sampai 15% bayar hutang, sisanya hanya tinggal sedikit untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang.

Nah kalau di tambah hutang lagi tentu porsi daripada bayar hutang ini akan semakin besar dan porsi untuk membangun bangsa ini semakin kecil. Jadi kalau menurut saya kita mendingan buka-bukaan dulu kepada para pengusaha, masukan dulu uang-uangnya ada di luar negeri supaya likuiditas dolar itu lebih naik lagi, karena ini sudah disampaikan oleh dari Bank Indonesia, masih banyak dollar- dolar dari pengusaha kita yang parkir di luar. Kalau ini Kadin bisa menyelesaikan ini saya angkat topi, hebat bisa memasukan ini karena ini semua dari dulu begitu. Aturan-

aturan BI, aturan-aturan OJK, dulu dibilangin supaya uang-uang hasil devisa masuk aja kan nggak terlaksana dengan benar.

Jadi ini pandangan saya, soal berapa yang dibutuhkan idealnya memang 1.600 triliun tapi itu duit dari mana. Pemerintah kan baru bilang baru bisa 450 triliun tapi itu baru disebut nama angkanya, duitnya ada nggak? Duitnya yang *real cash*nya ada nggak *liquidity*. Pemerintah bilangnya 405 berapa triliun untuk recover kita, 150 untuk perbankan, 70 atau 90 untuk Covid dan yang lain-lain. Ada duitnya nggak? Kalau cuma sebut angkanya duitnya nggak ada, ini duitnya kan sumbernya satu dari pajak. Ya dari SAL dana dari SILPA. Sisanya dari mana? Yang harus dikorek adalah satu, restruktur itu kita negosiasi dulu hutang kita kepada asing kepada debitur-debitur jangan terlalu cepat kita langsung kita mau pinjam hutang lagi. Kita minta nego dulu.

Yang kedua untuk menambah likuiditas, ya saya minta nasionalisme dan kesadaran dari para pengusaha yang gede-gede itu yang duitnya banyak di luar negeri khususnya di Singapura, tarik taruh di Indonesia. Kenapa Singapura tidak teriak soal masalah mereka punya likuiditas, karena duit kita masih ada di sana. Duit orang Indonesia masih banyak di sana. Mestinya kita melihat bawa tarik ke sini biar aja biar aja Singapura teriak-teriak. Nah ini enggak ada kesadaran dan kita tidak boleh terlalu terlalu semua disodor kepada pemerintah dan BI, suatu saat mereka tidak mempunyai kemampuan juga untuk menarik pinjaman, dan BI juga menjadi suatu Central Bank yang tidak sehat.

Yang kedua berikutnya adalah yang kita harus fokus sekarang adalah masalah Covid dulu. Kalau Covid ini belum selesai, kita kasih stimulus berapapun nggak akan bisa, karena apa? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah Covid orang tidak akan datang ke Indonesia baik menjadi wisatawan atau menjadi investor, karena mereka takut tertular dan orang Indonesia tidak bisa keluar negeri karena takut nanti menularkan kepada negara yang mereka mau kunjungi.

Kita akan menjadi negara yang diisolasi oleh dunia. Nah, sekarang kita harus fokus dulu, kita fokus menyelesaikan Covid ini dulu, baru mulai kita berfikir kasih likuiditas ke perekonomian dan cetak uang menurut hemat saya itu pilihan yang terakhir. Kita jangan mencoba-coba mencetak uang, inflasi meledak, nilai kurs naik, ekonominya tambah hancur.

Ini aja Pak Ketua. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullah barakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Mekeng.

Kadin di bawah Pimpinan Pak Rosan dan Apindo Pak Hariyadi bisa lah. Silakan selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra, Pak Supri ada Pak Supri. Silakan monggo Pak Supri.

F-P GERINDRA (Ir. SOEPRIYATNO):

Terimakasih Ketua.

Untuk putaran pertama kami persilakan pak Kamrussamad. Pak Kamarussamad.

F-P GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua

Ketua dan Anggota Komisi XI yang kami hormati

Ketua umum Kadin Pak Rosan beserta seluruh jajaran pengurus

Ketua umum Apindo Mas Haryadi beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada virtual meeting ini.

Pertama-tama kami mengapresiasi paparan yang telah disampaikan, ada berbagai macam hal permasalahan dan juga ada tawaran solusi yang disampaikan sekaligus sebagai bahan buat kami di Komisi XI untuk pada rapat kerja dengan mitra-mitra kami kedepan.

Di awal ini izinkan kami ingin menyatukan persepsi dulu tentang fundamental krisis kita. Kami menilai bahwa fundamental krisis hari ini itu adalah di bidang Kesehatan. Sepanjang permasalahan di bidang kesehatan ini belum terkendali sepenuhnya, kekurangan infrastruktur alat kesehatan, kekurangan berbagai macam tenaga medis, dan seterusnya maka agak sulit untuk kita meyakinkan pasar dan meyakinkan para investor juga untuk menggerakkan sektor riil karena itu kita harus bersama-sama memprioritaskan untuk mengatasi fundamental krisis hari ini yaitu krisis Kesehatan. Tentu kami percaya Kadin dan Apindo telah berbuat di sektor usahanya masing-masing di lingkungan bisnisnya masing-masing tentang hal ini, karena itu kami ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah sebetulnya telah mengeluarkan 3 kali kebijakan stimulus. Yang pertama pada 25 Februari senilai 10,3 triliun. Itu 7 hari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan adanya warga negara Indonesia positif Covid, tepatnya pada 2 Maret. Kemudian 11 hari setelah Pak Jokowi mengumumkan spemerintah kembali menggelontorkan stimulus kedua senilai 22,9 triliun tepatnya pada 22 Maret kemudian terakhir pada 31 Maret senilai nilai 400,51 triliun yang diumumkan sendiri oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor. Dari 3 stimulus kebijakan ini yang pertama, yang kedua, kemudian komponen ketiga dan keempat yang diumumkan Presiden Jokowi itu secara langsung maupun tidak langsung itu berkaitan dengan dunia usaha. Kami ingin mengkonfirmasi apakah teman-teman di Kadin dan Apindo sudah merasakan apa namanya kebijakan fiskal ini yang telah digelontorkan pemerintah di sektor masing-masing sehingga itu menjadi bahan evaluasi kita.

Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui betul bahwa hutang negara kita tercantum dalam undang-undang APBN tahun 2019 tentang APBN 2020, itu sudah mencapai 4800 triliun pada Januari 2020, dengan beban bunga

mencapai 299 triliun, yang harus dibayarkan tahun ini. Artinya memang sangat berat kondisi keuangan negara kita. Solusi yang ditawarkan Kadin bagi kami ini adalah sebuah pemikiran yang bisa jadi penting untuk kita kelak tetapi perlu kita ketahui bahwa posisi negara kita Indonesia ini berbeda sekali dengan negara-negara maju seperti Amerika. Dimana sistem birokrasi mereka itu sangat kuat, good governance-nya terjamin, sehingga tidak pernah terjadi skandal yang berlebihan seperti yang terjadi di Indonesia. Setiap 10 tahun dari tahun '98 BLBI kemudian tahun 2008 Century, apakah kita mau melahirkan skandal baru lagi di 10 tahun terakhir ini. Tentu kita tidak ingin karena itu kita harus melihat secara proporsional persoalan ini jika kita ingin mendorong quantitative easing karena currency kita berbeda sekali dengan mata uang dari Amerika. Yang mereka kalau mencetak mereka bisa mereka bisa sell mereka bisa jual keluar, tapi kalau kita seperti apa? Nah, ini yang sangat berat karena itu kalau Kadin ingin mengusulkan konsep ini karena Kadin memahami betul bahwa sektor UMKM adalah sector yang paling terdampak sekarang ini dan menyerap potensi lapangan kerja lebih dari 90% kalau angkanya saya lihat dari temen-temen tadi mencapai 130 juta dan 96% dari situ adalah sektor UMKM harusnya adalah skema yang ditelurkan itu adalah kemah untuk penyelamatan UMK.

Kalau yang disodorkan hari ini adalah skema yang penyelamatan 600 triliun itu melalui perbankan kemudian disalurkan ke dunia usaha sudah pasti itu larinya ke korporasi dan tentu sulit usaha kecil dan menengah untuk menjangkaunya. Nah inilah yang menurut saya agak ambivalen, kalau konsep ini kita bicara bahwa UMKM yang paling terdampak, UMKM yang paling banyak menyerap sektor lapangan pekerjaan tapi kemudian skema yang kita sodorkan adalah skema yang tidak memberikan ruang lebih besar pada UMKM.

Selanjutnya tentu kita tidak ingin tidak ingin melakukan apa namanya printing money sesuai dengan selera kita. Sebab kita ingin menjaga menjaga kelas negara kita yang sekarang ini sudah masuk di G20, walaupun misalnya karena faktor konsumsi tetapi harus kita akui harus kita akui bahwa masyarakat kita ini pendidikannya masih menengah ke bawah. Dalam dua minggu ini perbincangan tentang mencetak uang di publik di media sosial itu sudah beredar. Bahkan ada sejumlah orang yang terus mengatakan pastikan tahu alamatnya dimana kantor Bank Indonesia pada waktunya nanti kita akan bergerak kesana. Jadi sembako yang satu bungkus saja mereka perebutkan tidak peduli dengan pandemic, apalagi kalau isu printing money ini betul-betul menjadi isu masyarakat kelas bawah itu sangat berpotensi melahirkan chaos dan potensi konflik sosialnya sangat besar, karena itu ini perlu hati-hati mengungkapkan ke publik supaya tidak terjadi distorsi di tengah-tengah masyarakat yang kita harus akui kehidupan masyarakat kita sekarang ini kondisinya surut.

Apa yang diusulkan Mas Haryadi ketum Apindo ini saya kira mengenai perpajakan, BPJS, dan seterusnya ini sangat penting menjadi bahan kita dan implementasi POJK nomor 11 juga akan menjadi perhatian khusus kami nantinya untuk melihat progres sejauh mana realisasinya di lapangan. Kemudian yang terakhir Pimpinan yang saya ingin sampaikan itu adalah pernahkah kita teman-teman Kadin, Apindo berpikir bahwa di Perpu nomor 1 tahun 2020 sebetulnya pemerintah telah memberikan isyarat bahwa pemulihan ekonomi pandemic ini pemulihan ekonomi pandemic ini itu butuh waktu 3 tahun. Kalau saya mungkin bisa salah bisa benar penafsiran saya melihat pasal demi pasal dengan melonggarkan defisit anggaran selama 3 tahun tanpa batas maksimal. Kemudian pada tahun

2023, dikembalikan batas maksimum defisit kita 3% dari PDB maka menunjukkan bahwa pemerintah butuh waktu 3 tahun untuk me-recovery ekonomi.

Jadi kalau kita melihat poin ini di Perpu Nomor 1, Kadin dan apindo bisa merancang kebijakan usulan kebijakan stimulus ini atau program yang kira-kira sejalan dengan konsep yang di dalam pemerintah sebetulnya telah dirumuskan di dalamnya. Jadi kalau Pak Rosan mengatakan mesti cepat setuju cepat tetapi pemerintah sendiri telah melihat bahwa kita butuh 3 tahun waktu, dengan cara dengan bukti bahwa di salah satu pasal di Perpu itu dicantumkan pelanggaran deficit itu dikembalikan normal maksimal 3% pada tahun 2023. Jadi ini adalah ruang yang sangat besar 36 bulan bagi dunia usaha, bagaimana kita bisa sama-sama menyusun *roadmap* Kembali, karena harapan kami pasca pandemik ini akan lahir pengusaha-pengusaha hebat yang jauh lebih kuat di masa-masa mendatang dari Kadin dan Apindo. Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik terima kasih Pak Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem, kapoksi Pak Fauzi Amro. Pak Fauzi ada Pak Fauzi. Ayo silakan, silakan Pak Fauzi.

F-P NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Makasih pak Ketua, untuk putaran pertama Pak Rudi Hartono.
(Kapoksi dulu kapoksi saya yang mulia kapoksi dulu)

Pak Hatari dulu Pak Hatari. Halo, Pak Hatari gimana? Silakan Pak Hatari.

WATUA KOM. XI (Dr. ACHMAD HATARI SE., M.Si.):

Makasih Pak Kapoksi.

**Pak Ketua dan Pimpinan Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Pak Rosan dengan Apindo kami hormati.**

Terimakasih presentasinya baik sekali dengan tabulasi data-data yang cukup dapat teruji. Covid-19 ini masalah serius dan berskala global dan karena itu ini hanya bisa diatasi apabila semua pemangku kepentingan dapat mencapai kesepakatan bersama-sama melalui satu dialog, satu interaktif dengan dasar saling percaya. Terkait dengan itu, dampak langsung yang kita rasakan sekarang ini pak, penerbangan sudah tidak ada lagi. Dari Jakarta dan ke Jakarta pemerintah sudah melakukan semua stop. Susah ini pak di. Yang pertama saya ingin sharing Pak dari Kadin sekalian dengan Apindo. Sejauh mana Kadin sama Apindo ini ligitasi dan menghadapi pandemi Covid-19 ini terutama dari sektor kelompok usaha yang paling rentan ke pandemi ini tadi pandemi seperti tadi juga semua dari Gerindra dari Golkar, dari PDIP juga, Nasdem juga demikian. Berpikir tentang UMKM mau nggak mau, disini kami menganggap bahwa skema daripada UMKM ini pemerintah perlu

meninjau kembali yang itu batas minimum sulit pak. Juga termasuk korporasi yang paling terdampak pada pandemik.

Berikut upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak Kadin juga Apindo terhadap kebijakan pemerintah baik dari sisi fiscal, sisi moneter, perbankan juga dari sisi pasar modal. Berikut sudah siap ini pertanyaan dari kami pak sudah siap Kadin dan Apindo menyiapkan suatu strategi plan apabila pandemic Covid 19 ini selesai bagaimana reborn dari sektor pariwisata? Kemudian bagaimana peran Kadin dan juga Apindo ini dalam mendukung logistik yang dibutuhkan masyarakat perkotaan juga pedesaan? Kita ketahui bahwa ya kasihan Pak dan karena itu semua pemangku kepentingan Komisi XI ingin mendengar terkait dengan *policy* dari stimulus masing-masing pemangku kepentingan itu di solusi juga dari solusi juga dilakukan Apindo kepada para pengusaha dan termasuk ke perdagangan bagaimana ini supaya tetap. Di Jakarta saja Pak dengan teman dari Apindo kondisinya seperti begini apalagi di daerah-daerah terpencil di kawasan timur Indonesia. Yang kita sama-sama tahu bahwa sektor ini dia paling tahan terhadap krisis ekonomi dan ini menjadi satu andalan ternyata dengan kasus ini dia juga menyerah. Ini Covid-19 ini bukan hanya memakan banyak korban manusia tetapi juga memporak-porandakan fundamental ekonomi kita, ini sangat terasa sekali Pak. Jadi ini dampak langsung itu pak penerbangan sudah stop tidak ada lagi.

Bisa dibayangkan bagaimana pengaruh langsung terhadap sektor pariwisata yang juga menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap total APBN dengan Covid ini tidak bisa diperkirakan. Jadi, Komisi XI ingin mendengar ini Kadin dari Apindo dan para pemangku kepentingan yang sebelumnya telah melakukan dengar pendapat dengan Komisi XI. Dengan demikian Komisi XI mempunyai cukup bahan untuk melakukan sounding dengan pihak pemerintah itu. Barangkali Pak Fahri, Pak Fauzi sementara dari saya begitu nanti dikembangkan lagi pada sesi berikutnya.

Makasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Walaikumsalam

(Makasih Pak Hatari langsung ke Pak Ketua, Pak Dito)

Baik terima kasih Pak Fauzi Amro maupun Pak Achmad Hatari telah memberikan pendalaman dari Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Keadilan PKB, Ibu Kapoksi bu Ela ada nggak bu Ela. Silakan bu Ela.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.)

Sebentar, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti yang lain menyusun untuk bisa menanggapi. Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Apindo

beserta Kadin. Sebelumnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.

Yang terhormat Bapak Ketua selaku Pimpinan dan juga yang memimpin rapat kali ini.

**Para Ketua apindo beserta jajaran juga Ketua Kadin beserta jajaran
Para Anggota Komisi XI yang saya hormati**

Pertama, saya tadi cukup tercengang dengan... sebentar, (Mas kecilin Mas). Mendengar paparan cukup kaget apa yang menjadi konsentrasi dari Apindo beserta Kadin menyajikan data kemerosotan atau sangat-sangat menurun di bidang konsentrasi baik itu pariwisata, perkebunan, ritel hasil perkebunan, atau hasil pertanian, sangat *drop* sekali. Apalagi juga terkait dengan industri karena memang dengan penerapan *social distancing* atau *physical distancing* akan berkonsekuensi terhadap pola (suara tidak jelas) masyarakat kita.

Yang kedua, terkait dengan beberapa rekomendasi, tadi saya mendukung Kadin terkait dengan bahwa pemerintah, BUMN, atau BUMD, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi (suara tidak jelas) atau membeli produk-produk hasil UMKM, atau hasil dari produk pertanian, supaya laju perekonomian kita tetap berjalan. (suara tidak jelas) aktivitas-aktivitas usaha di zona hijau di zona-zona hijau yang saya pikir belum menjalani PSBB atau daya konsentrasi pandemic Covid-nya belum banyak itu harus tetap berjalan dengan pengawasan dan juga keterlibatan semua pihak, baik dari sektor industri ataupun sektor UMKM.

Naah dalam rangka menghadapi pandemi ini ada berapa juga tadi rekomendasi atau usulan dari Kadin beserta Apindo. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah juga tidak diam, dalam hal ini bagaimana program-program itu juga berjalan sesuai dengan analisa makro ekonomi, terkait dengan beberapa stimulus yang sudah dijalankan setidaknya itu juga dapat mengurangi risiko. Pertama stimulus satu terkait dengan perhatian terhadap sector pariwisata meskipun tetap pada sisi akhir mengalami pariwisata terdampak paling banyak juga. Yang kedua juga stimulus 2 terkait dengan PPH 21 atau penangguhan pajak dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari cara pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, apalagi stimulus ketiga banyak hal terkait dengan *safety net*, terlebih dengan kartu prakerja. Mungkin tadi meskipun belum sangat membantu dalam hal ini belum bisa mengcover, dalam rangka pemenuhan apalagi yang kena PHK untuk mempertahankan ekonominya per 3 bulan mendapat 600 meskipun ada pelatihan-pelatihan online yang saya pikir itu juga belum belum belum menjadi solusi, karena kalau bagi korban PHK cukup dengan diberikan stimulus atau apa beban hidup atau memang diberikan bantuan Rp600.000 cukup membantu dalam melangsungkan apa mempertahankan di wilayahnya masing-masing dalam rangka mereka karena kena PHK.

Terus usulan dari Apindo juga yang setiap apa perlu suntikan atau stimulus 1.600 T tadi sempet agak tercengang karena terutama fraksi PKB dari awal mengkritisi pemerintah juga terkait dengan beban hutang yang cukup banyak. Kita juga kemarin mengkritisi pemotongan-pemotongan dari biaya infrastruktur dan yang dialokasikan oleh pemerintah itu juga harus kita alokasikan seharusnya untuk mengurangi beban hutang. Betul tadi sudah dijelaskan bahwa beban hutang ini juga semakin akan mengurangi apa menambah beban generasi-generasi atau tahun-

tahun yang akan datang apalagi hari ini bagaimana dengan atau suntikan tahun-tahun yang akan datang. Apalagi hari ini bagaimana dengan stimulus atau suntikan 1600 T saya belum tahu gimana cara yang harus dilakukan, tetapi saya yakin dengan Apindo berkaitan tadi. Tadi saya cukup merespon pendapat Pak Mekeng sama dengan menurut kami, bahwa bagaimana para miliarder atau memang para pengusaha-pengusaha besar yang menaruh investasinya di luar negeri atau harus ditarik ataupun ada semacam kerelaan bantuan yang betul-betul tergerak untuk bisa menopang ini semuanya. Kalau memang kita mau fair berbicara bahwa keselamatan bangsa harus kita lakukan bersama. Bukan lagi kedepan malah misalkan saya nggak tahu kebijakan kita malah menambah hutang dan lain sebagainya itu yang akan kita hindarkan bahkan kita evaluasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Mungkin itu Pak Ketua, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang sudah dipaparkan oleh Kadin beserta Apindo mohon juga untuk pengawalan informasi yang terhadap kami. Sekali lagi mohon dalam momentum pandemi ini karena ini adalah bagian musibah yang harus kita jaga bersama. Jangan lagi atau memang kitaantisipasi terjadinya moral hazard di semua level kepentingan dalam rangka kelangsungan bersama dalam rangka keselamatan bangsa. Mungkin itu pak Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Ibu Ela Siti Nuryamah dari fraksi PKB. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi partai Demokrat, Kapoksinya bu Vera ada?

(saya pak)

Ya silakan bu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.)

Terimakasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya.

Kepada yang terhormat tamu-tamu kita pak Ketua umum Kadin, beserta seluruh WKU dan juga di sini ada Apindo dan juga seluruh jajarannya dan juga teman-teman, sahabat-sahabat saya dari Komisi XI yang saya hormati.

Tadi sudah saya mendengar pemaparan dari dunia usaha bahwa kita tahu kejadian Covid-19 ini ibarat palu yang memukul sangat kuat di bisnis mereka karena

belum 2 bulan ini pengeluaran biaya yang tanpa pendapatan sangat terimbas akibat Covid-19 dan tentunya tadi Bapak sudah menyampaikan Mas Rosan menyampaikan secara blak-blakan mengenai daya tahan bisnis semakin buruk pandemi Sorona sudah terasa, sebagian di bulan Maret sudah ada yang belum dilakukan sebelum Covid-19 ini sudah banyak industri yang melakukan PHK dan ditambah lagi dengan Covid-19 PHK hampir seluruh lini sudah berjalan dan sebagian lahan bertahan hanya sampai bulan April. Mereka melakukan penghentian produksinya.

Prediksi menurut BIN bahwa maksimal di bulan Juni 2020, bulan Juni Covid-19 ini akan berakhir kurvanya akan menurun tapi itu tergantung juga dari kerjasama masyarakat yang kita tahu masyarakat Indonesia ini sangat susah diatur. Yang memang kita lihat banyak di daerah yang masih melanggar terhadap instruksi pemerintah dan ini semua tergantung dari kita semua bagaimana kita berupaya menjalankan apa yang dihimbau oleh pemerintah namun saya juga melihat bahwa pemerintah saat ini hanya fokus kepada mudik atau pulang kampung antara itu saja, dan kedua juga pemerintah saya lihat masih fokus kepada bagaimana penyediaan APD dan juga ventilator serta belum masifnya dilakukan terhadap rapid test yang dilakukan oleh Korea walaupun mereka tidak melakukan lockdown sehingga mereka sangat berhasil melakukan latihan swab test secara masif ini yang kita harapkan di pemerintah juga melakukan hal yang sama.

Kita tahu bahwa uang yang sudah digelontorkan terhadap dampak Covid atau package Covid-19 ini luar biasa besarnya dan tadi dari Kadin menyampaikan beberapa item tentunya perlunya ada penambahan apa namanya penambahan terhadap 1600 triliun tersebut. Bahwa kita tahu pak tadi banyak teman-teman juga yang mengatakan bahwa kami juga sebetulnya pernah menanyakan hal ini kepada Bank Indonesia bahwa quantitative easing perlu dilakukan secara cermat. Tidak bisa serta-merta bahwa ini ada persoalan pandemik secara internasional sehingga perlu ditambahkan, padahal pada saat itu Indonesia sudah menggelontorkan 400 sekian triliun untuk dunia usaha dan kalau memang itu diperlakukan quantitative easing secara cermat seberapa banyak harus digerojogin ekonominya sehingga tiba malah akan timbul berbalik. Jadi terjadinya inflasi dan justru merugikan keuangan negara. Tentunya kita harus hati-hati melihat pola supply dan demand disini, selain inflasi juga perlu dipertimbangkan dampak kepada kepercayaan dan kredibilitas negara lain. Terutama yang (suara tidak jelas) tentunya sentimen pasar dan juga BI juga memiliki neraca dan pemerintah memiliki neraca jangan sampai jebol salah satu dari nilai chainnya atau jebol dua-duanya.

Padahal disini persoalannya saat ini bukan karena uangnya saja tapi juga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya bekerja bisa belanja, orang yang tadinya tidak kerja tentunya tidak bisa belanja, perusahaan yang biasanya produksi barang jasa yang mendapatkan revenue tapi sekarang ini malah di rumah ini nggak mereka tidak melakukan adanya spending power tidak terlihat daya belanja di masyarakat sehingga ekonomi terhenti.

Oleh karena itu saya beranggapan bahwa quantitative easing alias mencetak uang bisa dilakukan namun mesti ekstra hati-hati dengan perhitungan yang tepat dan sangat cermat dan itu yang saya pernah sampaikan konfirmasi kepada BI, bagaimana dan ISBD juga belum mengkaji apabila ada off dari pemerintah ingin melakukan 1.600 triliun. Kita tahu bahwa Sri Mulyani sangat sangat ketat dalam melakukan hal tersebut dan kami besok akan mendengarkan dengan KKSK bagaimana penyampaian mereka dan laporan

mereka per dua minggu terhadap mereka melakukan atau mengklasifikasi dunia industry apa saja yang perlu dilakukan secara cermat terhadap stimulus tersebut dan kami yakin bahwa kami juga sangat prihatin pak dengan dunia usaha. Bukan hanya kita sekarang ini fokus kepada go-jek ataupun ojol tapi bagaimana di tingkat yang paling bawah juga ada UMKM yang lain, dan juga hotel itu sangat berdampak tadi Pak Haryadi juga sudah menyampaikan bahwa kurang lebih ada kerugian 41 triliun ada kurang lebih 1674 hotel dan 500 restoran. Bayangkan mereka sekarang sampai mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan namun dengan pemberlakuan *quantitative easing* ini ditambah lagi menambah adanya penambahan 1600 kita harus hati-hati.

Kita uang kita tidak laku kemana-mana hanya beredar di negara kalau Amerika mereka cetak uang bisa lempar negara lain dan kalau di Indonesia kesulitannya dan bagaimana terhadap kurs yang akan terjadi peningkatan misalnya nanti sekarang ini Rp14.000 bisa menjadi Rp20.000 dan itu juga harus hati-hati. Saya kira memang perlu ada perhatian pemerintah khususnya untuk kalau saya lebih cenderung disini memang yang sangat terpukul adalah dunia hotel dan juga tourism. Itu sangat sangat mereka berdampak terhadap pergerakan ekonomi local dan itu yang tidak yang selama ini mereka hanya pendapatan kalau untuk daerah-daerah yang kalau kita tahu ada migas, ESDM nya, SDA nya mereka juga tidak begitu dampak tapi bagaimana daerah-daerah yang hanya mereka berdampak kepada sektoral terhadap tourism. Ini yang harus memang menjadi perhatian khusus, bagaimana mereka juga bisa menghadapi cash flow yang bisa terjaga terhadap perusahaan tersebut.

Saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, teman-teman Kadin maupun Apindo ini adalah semuanya sama bagi kita semua namun juga kita juga ingin ada timbal balik take and give apa yang disampaikan oleh Pak Melki bagaimana uang yang diparkir di luar negeri juga jadi seperti ada bargain-nya antara pemerintah dengan dunia usaha. Ini kita berikan, ayo kita putarkan lagi jadi itu ada sesuatu yang bisa kita inginkan daripada di dunia usaha dan pemerintah juga bisa berpikir seperti itu untuk bisa memberikan yang terbaik.

Saya kira tadi juga kami juga sudah meminta kepada pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar yang tidak menjadi skala prioritas untuk digelontorkan kepada pandemic Covid-19 ini, dan juga banyak sekali kami juga sudah melakukan rapat-rapat maraton dengan beberapa perbankan dan OJK kamu juga push juga mereka bahkan juga harus memperlakukan juga melakukan sangat hati-hati dan jangan sampai nanti ada penumpang gelap. Saya kira yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha adalah niatnya baik untuk kebersamaan kita semua namun bagaimana nanti kita menyampaikan pemerintah tentunya akan memberikan perhatian khusus namun dengan jumlah angka yang sudah digelontorkan 3 kali paket stimulus itu. Juga sudah diperlakukan tentunya juga kami berharap pemerintah juga bisa memberikan perhatian khusus bukan hanya kepada UMKM, tetapi juga kepada koperasi namun dengan skala hati-hati dan juga jangan sampai ada moral hazard yang timbul dan penumpang gelap yang sebelum Covid ini sudah, sudah sakit tapi ketika terjadi Covid mereka ikut masuk di dalam stimulus ataupun *package* Covid-19 yang akan pemerintah lakukan.

Saya kira itu saja dari saya teman-teman dari Kadin maupun Apindo. Tetap semangat jangan lemes kita tahu semua ini bukan hanya di Indonesia hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Terus semangat Pak dan juga jangan sampai karyawan tidak dibayar THR, bagaimana caranya mereka juga bisa

mendapatkan THR itu pesan saya saja. Untuk menghimbau kepada dunia usaha di seluruh Indonesia juga bagaimana caranya mereka juga bisa diberlakukan adanya THR karena juga jangan hanya mereka tidak udah diberhentikan juga mereka tidak tahu dan tidak bisa tidak ada uang yang mereka bisa belanjakan nanti setelah bulan puasa ini dalam bulan puasa ini. Itu saja saya berharap teman-teman di Kadin dan Apindo nanti kita coba akan menyampaikan kepada pemerintah besok bagaimana *exercise* ataupun apakah ada rencana penambahan tersebut tapi juga harus memperhatikan terhadap apabila terjadi dampak inflasi dan adjustment terhadap nilai tukar rupiah. Itu saja dari saya Pimpinan Pak Dito, selanjutnya saya serahkan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik terima kasih Bu Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PKS Pak Junaedi Auly, ada Pak Junaedi? Pak Ecky ada Pak Ecky? Dari PKS ada siapa? PKS nggak ada ya, PKS nggak ada? Oke kalau PKS nggak ada mungkin langsung aja ke PAN Pak Jon.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):

Pimpinan, Pak Ketua, hadir.
(silakan Pak Jon)
Ya terimakasih.

Pak Ketua, temen-temen Pimpinan, kemudian Pak Rosan dan teman-teman dari Kadin.

Pak Hariyadi, apa kabar Pak temen-temen dari Apindo.

Saya ingin mengajak dulu kita bersyukur hari ini kita bisa berpuasa dan ini *timing* untuk kita saya mengajak sekali lagi walaupun permintaan saya ke pemerintah melalui Bu Sri Mulyani waktu itu agar ada gerakan doa bersama dan diajak oleh Presiden langsung katanya akan disampaikan tapi hari ini belum ada, karena ini penting sekali. Kalau Allah mengatakan nanti sore itu selesai, selesai tapi kalau Allah menutup itu semua berapa tahun pun nggak akan selesai.

Jadi mari kita sama-sama berdoa bagi yang beragama Islam tentu ini waktu yang paling tepat karena kita berpuasa karena doa orang berpuasa itu insya Allah pasti diijabah dan temen-temen beragama lain bisa berdoa secara agamanya masing-masing.

Saya ingin menyampaikan Pak, 74 tahun kita merdeka ini adalah etape tersulit yang kita lakukan. Kalau nggak salah dulu Bung Karno bilang ada era saya katanya, itu jauh lebih mudah karena musuh yang kita hadapi kelihatan, tapi pada era generasi berikut nanti itu musuhnya tidak kelihatan. Waktu itu Bung Karno berpikir bisa dari dalam negeri sendiri tapi ini musuhnya luar biasa lebih-lebih tidak kelihatan lagi karena berbentuk virus. Nah ini perlu kekuatan doa. Jadi etape ini ibarat kita naik mobil saya lihat ini mobil kita ini nggak terlalu sehat kemudian bensinnya kurang pula udah dibawah setengah. Kemudian tujuan yang kita mau

capai ini belum tahu berapa kilo lagi. Hanya nebak-nebak ada kemungkinan 10 kilo mungkin 50 kilo atau 100 kilo ke depan. Makanya kemarin kita minta ke pemerintah coba bikin scenario, skenario berat, medium berat dan sangat berat. Mudah-mudahan besok mereka akan jawab.

Jadi dalam kondisi seperti ini saya tadi mencatat juga beberapa yang disampaikan oleh Pak Rosan dan Pak Hariyadi, juga disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu menyampaikan beberapa hal. Jadi ada dua hal yang memang perlu kita cermati betul. Sisi penerimaan kita atau pemasukan kita dan sisi pengeluaran kita. Kalau kita cerita tadi sisi pengeluaran yang diusulkan oleh teman-teman dari Kadin, kemudian dari Apindo tadi kisaran kira-kira 1600 triliun. Mari kita lihat juga apakah cukup 1600 triliun itu. Kemudian tadi kita lihat sisi penerimaan apakah ada uang 1600 triliun itu.

Saya mau mengajak kita sama-sama mendiskusikan hal ini. Pertama, ada 2 sisi untuk penerimaan kita ini, pemasukan. Sisi dari fiscal dan sisi dari moneter. Sisi dari fiscal, Perpu sudah menetapkan bahwa ada kelonggaran defisit budget sebesar 5,07%. Selama ini Undang-undang menetapkan maksimal 3% dan sekarang selama ini juga kita jaga itu di bawah 2%. Itu berjalan kira-kira shortage-nya setiap tahun 170 sampai 160 triliun. Artinya itu ditutup, ditutupi dengan pembiayaan kalau kita nggak mau disebut itu hutang. Nah kemudian kalau dengan 5,07 ini kira-kira kita punya 500 triliun, kalau hutang itu bisa kita capai dari luar. Artinya ada 500 triliun dari 500-an itu kita sudah allocate 405 seperti yang tadi Pak Mekeng katakan sudah untuk Covid 75 triliun, 110 untuk UMKM, 150 untuk cadangan recovery ekonomi dan seterusnya.

Nah, permasalahannya apakah ini cukup. Kalau ini nggak cukup apa yang dilakukan saya sepakat harus ada renegotiasi hutang kita, hutang negara terhadap kreditur dari luar, tapi ini sudah kita sampaikan kalau ndak salah waktu itu ada teman dari Komisi XI juga menyampaikan dan direspon oleh Ibu Sri Mulyani itu tidak mungkin untuk dilakukan karena akan menurunkan grade kita diluar negeri. Ini kan termasuk negosiasi- negosiasi yang harus kita dorong supaya kita tidak terlalu kelabakan di dalam negeri membayar cicilan, hutang maupun bunga.

Kemudian dari sisa hal tersebut dari mana lagi sisi fiskal bisa mengendalikan ini tentu pengalihan realokasi yang berkaitan dengan anggaran yang disebut dengan refocusing. Jadi fokusnya di ulang kembali, fokusnya itu seperti apa tapi sudah dilakukan oleh pemerintah itu kira-kira yang disampaikan pada pertemuan yang lalu hanya 90 triliun. Nggak terlalu banyak yang bisa dialokasikan tapi kami pak Rosan dan Pak Haryadi juga mendorong pemerintah agar setiap K/L itu juga betul-betul mengalokasikan lebih besar lagi dari yang direncanakan.

Kemudian kita lihat dari sisi moneter, sisi moneter kita punya Bank Indonesia yang akan memenuhi likuiditas di pasar. Nah likuiditas ini yang dimiliki oleh Indonesia juga terbatas, ada GWM yang sekarang sudah turun jadi 34% kalau dari 7000 triliun itu katakanlah sekarang maksimal mereka punya cadangan GWM itu 240 triliun. Kemudian ada cadangan devisa dan ada kerjasama di negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan, Amerika, dan Eropa Barat tentunya. Nah, kondisi seperti ini kalau GWM nggak mungkin kita nol kan pasti minimal itu harus dijaga 2%. Artinya ada cadangan likuiditas tersebut 140 triliun.

Apalagi cadangan devisa, cadangan devisa ini Pak Rosan, Pak Hariyadi sudah paham itu adalah 6 bulan sampai 7 bulan impor. Kemudian, cicilan bayar hutangnya yang akan 6 bulan 7 bulan juga. Normalnya, paling minimnya itu kita harus punya 3 bulan impor, 3 bulan cicilan hutang. Katakanlah kita bagi dua lagi

ada sekitar 60 triliun dari 60 miliar dolar dari 122-an cadangan devisa kita. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan ya pelebaran likuiditas kalau kita tidak mau menyebut itu cetak uang baru gitu. Kapan ini digunakan semua, inilah harus punya alat ukur yang pasti.

Nah, tadi saya menyampaikan kita ibarat perjalanan mobil ini tujuan yang mau dicapai ini belum tahu berapa kilometer lagi. Makanya kita punya asumsi-asumsi, tadi secara kelakar dan juga disampaikan resmi oleh Pak Rosan dan Pak Haryadi bahwa kekuatan pengusaha ini kan 3 bulan ke depan. Nah kalau 3 bulan ke depan ini tidak ada uluran tangan pemerintah, sehingga semua akan *collapse*. Collapse bangun kembali itu sulitnya bukan main. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang. Saya sepakat bahwa apapun kebijakan yang diambil harus segera direalisasikan, kalau ini terlambat sehari dampaknya luar biasa apalagi kalau terlambat sebulan.

Sementara hari ini banyak sekali yang disampaikan oleh pemerintah belum sampai ke tangan-tangan penerima. Nah ini jadi masalah besar. Jadi ada *time lack* di situ. Mungkin kita bisa pahami bahwa sumber pemasukan yang dari pajak kemudian hutang-hutang yang di setup SBN dari pemerintah itu belum langsung di absorp oleh market atau kebutuhan cash in flow-nya belum belum cukup itu situasi negara mengatur juga ini keluar sesuai schedule-nya, tapi ini tidak bisa ditunda. Kita lihat misalnya ada kebijakan dana desa. Dana desa itu dialokasikan sekian persen kalau bisa 50% untuk kepentingan Covid gitu, tapi tahu nggak di lapangan untuk cair dana desa itu Ketua IBC barusan berbicara sama saya menelepon bahwa mereka itu diberi 14 persyaratan. Yang disebut miskin itu adalah ini ini ini dan lain-lain. Memenuhi 14 persyaratan itu sangat sulit karena kondisi orang tadinya mampu, karena kondisi Covid jadi tidak mampu. Nah, itu baru satu sisi.

Kita lihat juga yang lagi viral ini bagaimana komplain para bupati, komplain yang lain-lain bahwa ada desa juga di Jawa Barat juga komplain bahwa data tidak cocok dan hal-hal ini juga telah kita sampaikan berkali-kali ke BPS, sejak 5 tahun 6 tahun yang lalu bahkan periode yang lalu. Nah, ini sekarang menjadi sesuatu yang harus kita ambil eksekusinya gitu. Kalau ini tidak ada eksekusi apapun, jadi pemerintah harus juga berani mengeksekusi kebijakan ini tidak di tataran yang berkaitan dengan retorika. Bagaimana eksekusinya di lapangan itu yang paling penting. Jadi rencananya seperti apa tadi disampaikan soal rencana pencetakan uang, ini adalah solusi yang tadi saya bilang kalau ndak cukup semua solusi terakhir tapi kalau ini digaungkan sekarang saya yakin itu teman-teman yang punya uang langsung beli dollar semua. Atau jangan-jangan sekarang udah di dollar semua gitu.

Tadi ada pemikiran bahwa dari Pak Mekeng dan ada anak yang eks repatriasi yang kita harapkan Kembali, itu digugah dong supaya Kembali, saya kok enggak yakin itu dengan Undang-undang saja mereka nggak mau kembali kok. Mereka baru bisa kembali kalau dengan kekuatan hukum tapi kekuatan hukumnya kan sudah nggak ada suruh mereka kembali. Nah, ini juga menjadi masih jauh kalau menurut saya untuk dilakukan hal tersebut. Bahkan, saya menghawatirkan juga relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan saat ini juga jangan-jangan nanti para pemain itu mendapat fasilitas utama lagi. Nah, ini menjadi sesuatu. Kita lihat ya pengalaman juga jadi harus dikombinasi dilihat data-data sebelumnya. 98 kita lihat terjadi resesi itu hanya ekonomi dan hanya beberapa negara, Thailand, Korea, dan berapa negara tapi yang paling lama recovery-nya adalah Indonesia. 7 tahun setelah mengeluarkan dana rekap dan seterusnya, 7 tahun baru Kembali. Apa yang saya lihat di Thailand, 1 tahun lebih mereka sudah

kembali normal. Korea 1 tahun lebih sudah kembali normal. Ini juga perlu kita pertajam melihatnya karena apa yang mereka lakukan kalau saya tidak salah pada saat itu mereka melakukan haircut sehingga haircut itu kan uang nggak keluar dilakukan internal tapi harus prudent. Harus betul-betul pada usaha-usaha yang menyanggung kepentingan bangsa.

Nah ini mungkin salah satu pola-pola yang mungkin yang bisa kita menjadi referensi, kita lihat kemungkinan-kemungkinan dengan formula-formula yang tepat sesuai kebutuhan bangsa kita. Jadi ini adanya Apindo, adanya Kadin hari ini, mari kita sama-sama kalau kita cetak uang resikonya sejauh mana, terukur kalau itu bisa terukur dan kita tahu resikonya, termasuk nanti bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, itu menjadi sesuatu ukuran yang paling penting juga.

Jangan nanti semua masyarakat mengalihkan dananya ke US Dollar semua atau sebaliknya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harus kita buat dan pemerintah harus men-drive ini, harus meyakinkan, jadi tidak bisa berandai-andai. Kan lucu kalau dalam pembicaraan selalu digambarkan kira-kira 6 bulan atau di bawah 6 bulan ini mudah-mudahan sudah selesai tapi dalam kebijakan di Perpu dibuat 3 tahun. Nah, ini kan ada ambivalent gitu, kalau memang yakin dengan setahun cukup setahun 2021, budget defisitnya kembali ke 3%, tapi kalau 5 tahun berarti sudah dicadangkan untuk hal-hal yang lebih panjang jadi kondisi-kondisi seperti inilah Ketua dan teman-teman Komisi XI, serta, teman-teman Kadin dan Apindo, kita mari urun rembuk terus ini karena kita nggak bisa juga membiarkan pemerintah sendiri dengan keterbatasan tadi. Mereka saya melihat 10 tim, kalau bicara 1600 triliun tadi saya udah sampaikan. Mungkin angka yang diajukan itu tepat bukan tidak mungkin karena belum kita kaji dalam tapi apakah uangnya ada gitu lho. Pemerintah uangnya dari mana, jadi kalau mencetak uang dengan risiko apa gitu. Jadi kira-kira pandangan saya seperti itu Ketua. Terimakasih, Billahi taufik wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Jon Erizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional, selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PPP Kapoksi ada?

(Ya siap pak Ketua)

Ya silakan bu

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi XI beserta para Anggota Komisi XI, Pimpinan Kadin dan Apindo

Saya rasa dari pembicaraan pertama sampai yang ke-8, saya menyetujui apa yang disampaikan teman-teman terdahulu bahwa ada harus apa namanya menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menunjukkan keinginan untuk meminta

stimulus oleh Kadin ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa salah satu dampak Covid-19 adalah kepada sektor pariwisata. Dimana di Nusa Tenggara Barat juga hari ini sudah masuk dalam PSBB untuk hari kedua pak. Jadi pesawat sudah tidak ada di dari kelompok sehingga berdampak kepada dampak ekonomi juga dan dampak dari pariwisata sebagaimana disebutkan tadi ada sekitar 1.674 Hotel telah ditutup. Kemudian dari informasi KeMenterian tenaga kerja 150% karyawan sudah di-PHK belum sektor-sektor lain yang luar biasa pengaruhnya. Oleh karena itu kami berharap kepada kita semua untuk betul-betul memperhatikan jalan yang terbaik untuk mengatasi pengaruh dari Covid-19.

Kemudian tadi disebutkan tekanan terhadap UMKM juga sangat luar biasa disertai data-data dan yang disampaikan oleh Kadin yaitu permintaan sekitar 1600 triliun untuk stimulus yang setara dengan 10% PDB Indonesia dengan jaring pengaman sosialnya 600 triliun, jaring pengaman kesehatan 400 triliun, dan jaring pengaman sektor riil keuangan 600 triliun. Ini artinya dari pihak Kadin minta perluasan stimulus dan jaring pengaman sosial. Saya rasa dalam hal ini perlu usulan yang masuk akal dengan melihat kesiapan anggaran yang ada di APBN. Oleh karena itu saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bapak Mekeng dari Golkar bagaimana para pengusaha kita yang banyak masih menyimpan uangnya di luar negeri untuk diketuk nasionalismenya untuk ikut berpartisipasi, bagaimana ikut mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini. Sehingga saya berharap dari usulan dari Kadin tadi sebanyak 1600 triliun itu perlu di *replanning*, di *planning* ulang sesuai dengan keadaan APBN kita.

Kemudian tadi juga disebutkan bahwa ada informasi bahwa rapid test di Singapura itu 12.000 per satu juta orang kemudian di Amerika 10.000 per satu juta orang, kemudian juga di negara-negara lain, tetapi di Indonesia masih lebih rendah dari yang disebutkan tadi. Padahal jumlah penduduk kita adalah 5 besar dunia oleh karena itu tentu data-data hasil data hari ini yang kena dampak Covid-19 tentu dipertanyakan oleh dunia maupun kita. Oleh karena oleh karenanya pengadaan alat rapid test ini perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi penyebaran lebih banyak lagi Covid-19 di Indonesia.

Kemudian Apindo juga menjelaskan tentang bagaimana dampak Covid-19 ini terhadap pariwisata, sektor otomotif, informal dan sektor lainnya ya. Kami juga tetap mengharapkan perhatian kepada sektor pariwisata itu juga mendapat perhatian lebih karena yang paling terdampak terhadap Covid-19. Kemudian tadi disebutkan ada ketidaksinkronan, sinkronisasi surat edaran nomor 4 dan nomor 7 Menteri Perindustrian. Yaitu mendukung aktivitas industri sehingga kebutuhan untuk masyarakat bisa tetap berjalan. Saya rasa ini juga karena tidak sinkron dengan pemerintah daerah, perlu diambil langkah-langkah strategis berikutnya agar di bedakan mana yang zona merah mana yang zona hijau, sehingga jelas zona hijau kalau memang bisa berjalan dengan baik kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya perlu terus di *backup*. Jangan sampai sama perlakuan di zona merah dan zona hijau.

Kemudian saya berharap ke depan dengan ketidaksinkronisasinya pemikiran tentang surat edaran Kementerian Perindustrian dengan Pemda mudah-mudahan ada titik temu. Kemudian rekomendasi untuk dunia usaha oleh Apindo saya sangat memback-up itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik kedepannya. Kemudian juga sama dengan apa namanya, Apindo dengan yang lainnya sama perluasan stimulus saya kira ini juga *replanning* agar apa yang diharapkan nanti bisa berjalan dengan baik.

Akhirnya dari semua itu para Anggota Komisi XI kami berharap dari daerah bahwa implementasi atau realisasi dari apa yang kita bicarakan hari ini itu yang lebih penting segera dilaksanakan. Untuk mendapat manfaat masyarakat kita yang ada di daerah.

Saya rasa ini dari saya Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terimakasih pada Ibu Wartiah, kapoksi dari PPP. Selanjutnya mungkin dari Pimpinan ada yang ingin memberikan pendalaman Pak Amir atau Pak Fathan atau Pak Eriko. Nggak ada, baik. Ya silakan bu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA)

Pimpinan kalau diizinkan apakah saya boleh sedikit menambahkan Pimpinan.

(boleh boleh silakan bu Indah)

Terima kasih, Pak Dito.

Terimakasih Bapak Ibu Anggota dari Komisi XI, juga dari Kadin dan Apindo terimakasih untuk pemaparannya tadi, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa semoga bulan Ramadhan ini merupakan momentum yang baik bagi kita untuk bersama-sama menyenangkan atau meng-*entertain* Tuhan agar segera membantu kita bebas dari pandemi yang sangat mengerikan dan sampai saat ini kami masih belum bisa tenang karena solusi atau stimulus yang telah dikeluarkan itu menurut pengamatan kami belum bisa menjawab 100%, dan tadi apa yang telah dipaparkan oleh Kadin dan Apindo terima kasih karena sudah mampu menjelaskan kepada kami dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi diantara adalah bahwa nafas yang saat ini tersedia antara 3 tersisa 3 sampai 5 bulan. Kemudian tetap kita harus menjaga cash flow dan likuiditas.

Kemudian salah satu sektor yang memang harus kita jaga sepertinya adalah sector UMKM yang selama ini sudah mampu menyerap lebih dari 40% tenaga kerja dan berkontribusi menyumbang PDB 60%. Terus kemudian juga adanya mismatch antara sejakadanya POJK 11 itu juga dari penuturan dari perbankan yang hadir di Komisi XIs itu saat ini terjadi mismatch antara selain *cost of fund* versus beban, restru restrukturisasi yang nilainya sudah mencapai 1650 triliun kalau itu ada penundaan pokok dan bunga. Kemudian juga adanya mismatch antara tenaga yang menangani SDM-nya dibandingkan dengan permohonan restrukturisasi itu sendiri.

Nah kemudian dari apa yang disampaikan oleh Kadin tadi dan saya tahu bahwa Kadin dan Apindo ini merupakan satu entitas yang sering diajak untuk berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini juga presiden. Mungkin kebijakan stimulus yang telah diluncurkan oleh pemerintah itu betul-betul dievaluasi dan kalau memang tetap bisa dilaksanakan, dilaksanakannya dengan sangat bijak dan praktis

agar tidak ada sebagian atau kelompok tertentu yang mengambil profit yang mencoba untuk mengais profit dari kondisi Covid seperti ini. Jadi tidak mengambil profit atau keuntungan. Menyatukan hati, kemudian takutlah sama Tuhan gitu bahwa Tuhan mungkin akan berbelas kasihan kalau kita sepakat Tuhan gitu, bahwa Tuhan mungkin akan berbelas kasihan kalau kita sepakat semuanya. Meningkatkan tadi istilahnya Pak Mekeng, nasionalisme bersama-sama untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah ini. Mengingat sampai sekarang ini kalau dari universitas Singapura kemarin kan itu sampai dengan 100% nya bisa sampai dengan bulan September tetapi kalau poin yang paling penting tadi yang saya tangkap dari penuturan Pak Rosan yaitu Bahwa Indonesia itu yang paling rendah nomor 2 setelah Kamboja di dalam upaya untuk melakukan tes terhadap masyarakatnya. Hanya 16.000 ya per 1 juta. Atau 160 ya 160 orang dari 1 juta. Nah itu kan 160 orang per 1 juta. Sementara Singapura 16.000 per 1 juta. Itu sebenarnya mungkin kuncinya di situ sehingga kesannya seolah-olah rasio kematian di Indonesia tuh sxtinggi bukan karena yang meninggal banyak tetapi dibandingkan yang meninggal dengan yang terdeteksi bahwa dia terinfeksi itu tidak sesuai dengan kenyataan.

Kalau yang meninggal itu sesuai dengan kondisi riil tetapi yang dilakukan test dan ketahuan kalau dia terinfeksi itu kan masih sedikit. Padahal itu hanya rapid test yang menggunakan rapid test yang sangat akurasiya mungkin belum 100%. Sementara di negara lain ada yang menggunakan dengan masif test yang sangat lebih valid, lebih akurat yaitu swab. Menurut saya seluruh scenario, seluruh stimulus, relaksasi apapun yang pasti juga tidak akan mampu bertahan lama perbankan kita juga likuiditasnya tidak akan mampu bertahan dengan restrukturisasi ini. Dulunya mungkin dia katakanlah, konsumtif itu yang di biaya itu adalah tercatat sebagai pegawai. Sekarang ini kan sudah beberapa gerai restoran besar pun dari 700 gerainya sudah ditutup 300-400 outlet.

Sekarang tuh banyak sekali yang statusnya tadi pegawai debitur itu menjadi bukan pegawai. Dia sudah tidak memiliki pekerjaan dan itu juga ada masalah dengan penutupan asuransinya apabila restrukturisasi itu diundur, apabila katakanlah 1 tahun, perpanjangan 1 tahun kedepan itu menjadi beban siapa preminya. Itu banyak sekali masalah yang dihadapi untuk stimulus tersebut. Jadi menurut saya sebelum skenario itu dijalankan tentu yang paling penting adalah alokasikan anggaran itu untuk mengetahui dengan jelas seberapa banyak sih masyarakat kita yang terinfeksi. Jadi jaring pengamannya itu bukan di post tapi yang sebelumnya dipastikan dulu, berapa korbannya setelah tahu skenario itu bisa kita jalankan kalau tidak maka yang namanya kurva W tadi, itu pasti akan terjadi tidak mungkin bisa pasti U atau kurva terbalik ya tetapi kurvanya bisa W karena memang tidak jelas, tidak pasti.

Selain juga ada kekurang sadaran mungkin masyarakat kita yang menganggap masih belum mengetahui bahwa Covid ini sangat berbahaya dan timing-nya mungkin timing halal bihalal atau timing Ramadhan. Itu yang biasanya memang kita semua berkumpul untuk merayakan bersama hari besar. Maka yang saya pikir yang pertama-tama paling penting adalah alokasikan anggaran untuk mendeteksi secara benar berapa sih yang terinfeksi dan setelah itu secara paralel seluruh dunia usaha tuh diselamatkan khususnya yang masih bisa survive, yang masih bisa bertumbuh dan diatur restrukturisasi secara selektif dan bijak tidak digeneralisir artinya benar-benar sangat selektif dan itu sangat memberatkan likuiditas perbankan. Menurut saya kalau itu dijalankan saat ini kan seolah-olah

seperti publikasi yang sangat menarik gitu untuk disampaikan dan semuanya merespon bersama-sama mengajukan restrukturisasi. Pimpinan mungkin sedikit pendapat dari saya tambahannya seperti itu. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keselamatan agar kita tentunya paling tidak bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita di bulan Agustus lah Pimpinan itu harapan saya. Terimakasih, Tuhan memberkati.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik, terima kasih Bu Indah Kurnia. Baik selanjutnya mungkin jam menunjukkan pukul 14.03 kami berikan kesempatan kepada Ketua umum Kadin Pak Rosan selaku Pimpinan. Baik silakan Pak Fauzi. Siapa tadi?

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M.):

Pimpinan, Didi Irawadi dari Fraksi Demokrat, boleh sedikit.
(Silakan Pak Didi, silakan Pak Didi.)
(Pimpinan El Nino juga)
(Ya Pak Didi silakan Pak Didi)
Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Komisi XI DPR

Yang terhormat Pak Rosan dan Pak Haryadi sebagai narasumber kita pada hari ini.

Tadi saya kira banyak sangat berharga terima kasih masukan-masukan yang disampaikan. Ada yang bisa kami terima, ada juga yang tentu perlu pendalaman lebih lanjut ya pendalaman lebih jauh ya. Kita semua saat ini dalam kesulitan, kesulitan besar bangsa Indonesia ini. Oleh karenanya ada yang menjadi fokus saya khususnya untuk Kadin dan Apindo, pertama-tama adalah kita harus memastikan dulu penanggulangan masalah sumber masalah ini bagaimana Covid 19 ini bisa bisa diselesaikan. Walaupun tadi berbagai usulan stimulus-stimulus ekonomi dan sebagainya, tanpa kita bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya ini rasanya akan panjang persoalannya. Oleh karenanya usulan saya pada Kadin, mari kita terus mendorong dan menjaga agar persediaan alat- alat pelindung diri, alat-alat Kesehatan, alat rapid test dan sebagian terkait ini, ini benar-benar tersedia, karena kita sampai hari ini kan tidak tahu kapan ini dampak Covid 19 ini akan berakhir tetapi dengan persediaan dari industri-industri yang terkait dengan alat alat pelindung diri ini benar-benar siap. Tentu ketika yang terinfeksi makin banyak pemerintah dan kita semua menyiapkan berbagai fasilitas yang ada, fasilitas kesehatan rumah sakit dan sebagainya yang dengan memadai ini akan bisa tidak menjadi semakin luas. Dampak dari Covid 19 ini, oleh karenanya industri-industri yang menyangkut kesehatan ini tolong dijaga, dikawal dan harus diperhatikan oleh Kadin dan Apindo.

Tadi ada persoalan lain mengenai pencetakan uang, saya kira ini harus dialami lebih jauh ya. Walaupun mungkin usulan dari Kadin ini sudah ada

analisisnya dan sebagainya tetapi saya kira harus ada pendalaman lebih jauh tidak sesederhana itu, menurut hemat saya dan jangan sampai terjadi sesuatu yang diluar perkiraan kita terjadi inflasi dan sebagainya malah merugikan perekonomian di negara kita ini. Jadi saya kira, saya mungkin itu saja, tambahan saja. Tambahan dari saya jadi benar-benar yang menyangkut alat-alat pelindung diri ini bisa dijamin oleh negeri ini, oleh pemerintah, oleh para pengusaha sehingga bilamana kedepan situasi semakin buruk bangsa kita benar-benar siap menghadapi persoalan dari induk persoalan itu sendiri, dari inti permasalahan. Baru kita lebih jauh bicara sisi stimulus ekonomi dan sebagainya, tanpa kita persoalan itu kita bisa bisa selesaikan dengan baik, maka nggak ada gunanya yang namanya ide-ide stimulus ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu tambahan singkat dari saya Bapak Ketua terima kasih.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Ijin Pimpinan, ijin Pimpinan saya Rudi Nasdem Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Sebentar, saya kira ada baiknya mungkin Kadin dan Apindo memberikan jawabannya dulu setelah itu baru kalau mau interupsi bisa kali. Bagaimana?

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Sikit Pimpinan, sikit-sikit aja pendek

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Siapa tuh?

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Rudi, Rudi Hartono Bangun.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Tadi Pak Elnino sudah bilang duluan, Pak Elnino singkat-singkat boleh Pak Elnino singkat, Pak Rudi singkat.

F-P GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si):

Baik, terimakasih.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya setelah Pak Elnino Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Pak Elnino, Pak Misbakhun terus Pak Rudi. Kembalikan ke Kadin dulu ya. Silakan singkat-singkat aja ya.

F-P GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si):

Oh iya terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak Ketua Kadin dan juga Ketua Apindo yang saya hormati beserta jajaran. Rekan-rekan, Pimpinan Anggota Komisi I, Komisi XI maaf Komisi XI yang saya hormati.

Saya mencoba untuk tidak mengulangi tapi ingin apa namanya suatu ketegasan dari Kadin maupun dari apindo, karena begini pak kita ini lagi kebingungan. Pada saat pertama pertama kali Covid masuk di Indonesia dan dibahas di Komisi XI, itu Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia masih masih cukup optimis. Kita masih positif apa namanya pertumbuhan ekonomi dan kira-kira satu minggu kemudian mereka sudah mulai tampak tidak PD lagi. Yang setelah itu beberapa hari kemudian, kita juga bicara dengan beberapa bank yang mengeluh dan tetapi ada lagi optimisme yang kami tangkap dari Bursa Efek Indonesia gitu. Nah ini muter-muter ini ini apa diskursusnya ini Bapak-Bapak Kadin dan juga Apindo, dan juga karena apa pemerintah kalau bicara itu bilang bahwa kita bisa bagus kalau pengusaha begini, buruh begini, ini begitu gitu loh. Bank juga bicara kita masih bisa bagus kalau pemerintah begini, kalau pengusaha begitu kalau ya gitulah. Kemudian, muncul lagi berita dan juga tadi presentasi dari keduanya Apindo maupun apa Kadin itu mengatakan bahwa kita masih bisa bagus kalau ada stimulus ini stimulus itu, stimulus ini. Ini agak jadi bingung sebetulnya kita nih. Sebetulnya begini maksud saya pak, pak para pengusaha ini di sini kan ada juru bicaranya Kadin dan Apindo. Pertanyaannya sederhana sebetulnya kalau misalnya, pemerintah tidak kasih stimulus kira-kira adakah secercah optimisme yang ada di pengusaha-pengusaha Indonesia? Kira-kira itu saja pertanyaan saya. Kalau ada aku mohon di dipaparkan nanti setelah ini. Kalau tidak ada ya bilang aja bahwa Bapak-Bapak nyerah gitu atau apa gitu kira-kira supaya kami bisa dengan tegas menangkap pesan Bapak-Bapak. Terimakasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terakhir Pak Misbakhun dan Pak Rudi ya. Langsung to the point sesuai dengan apa yang disampaikan sama Kadin dan Apindo. Silakan Pak Misbakhun setelah itu Pak Rudi.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terimakasih.

Pak Ketua Komisi XI, Pimpinan Komisi XI, Anggota Komisi XI yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pak Ketua kepada saya.

Yang saya hormati Bapak Ketua umum Kadin, Kamar Dagang Indonesia beserta jajarannya dan Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo beserta jajarannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua

Apa yang disampaikan oleh Ketua umum Kadin, Pak Rosan dan Ketua Apindo, Pak Hariyadi Sukamdani ini menjadi membuka perspektif saya dan membuka perspektif kita semua tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha pada situasi saat ini. Menghadapi akibat dari pandemi Covid-19 ini di dalam struktur ekonomi dan bisnis kita, karena apa mereka lah yang tahu seberapa dalam permasalahan ini. Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha kalau dalam hitungan saya adalah pengusaha yang kredibel, mereka pasti akan sangat bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi usaha mereka masing-masing sehingga mereka tentunya tidak akan teriak minta bantuan pemerintah kalau kemudian mereka bisa menyelesaikan urusan mereka ini, karena apa selama ini kan mereka bisa survive, bisa menjadi besar, dan kemudian menjadi pengusaha yang kredibel karena mereka mempunyai reputasi untuk itu.

Kalau kita perhatikan Perpu nomor 1 tahun 2020, itu semua instrumen digunakan oleh pemerintah. Termasuk kalau kita perhatikan pasal 2 ayat 1 huruf E, itu mulai dari silpa dana abadi, dana yang dikuasai oleh negara, ilman, BLU dan sebagainya termasuk yang ada di BUMN segala itu termasuk dalam instrumen yang akan digunakan oleh negara dalam mengatasi realokasi dan refocus. Artinya apa bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin mengatasi dan kemudian kalau kita menghadapi pandemi seperti ini dimana dunia usaha mengalami penurunan yang sangat drastic, sangat drastis saya sampaikan karena apa semua *supply side and demand side*-nya kan berhenti.

Nah, jangan berharap terlalu banyak dari pajak. Pajak ini kan karena apa dari aktivitas bisnis, kalau kita perhatikan nanti kita belum rapat sama Dirjen pajak, kalau kita perhatikan saya yakin penerimaan pajak kita masih belum mencapai

sekitar 20, 21%. Itu udah maksimum di bulan keempat, dimana SPT sudah pada masuk walaupun diperpanjang oleh pemerintah. Artinya apa, pilihan kita satu-satunya adalah dengan pemerintah mencari hutang. Hutang ini harus kita akui bahwa adalah pilihan terakhir, tapi ini kan bukan tujuan ini kan hanya alat kita menyelesaikan masalah. Kalau kita mau mencekik pengusaha kemudian lewat pajak lagi, maka tidak akan jalan. Sudah tertimpa pandemic Covid, jadi dari sini saya bisa memahami angka-angka yang keluar dari pengusaha itu tadi tapi permasalahannya saya begini pertanyaan saya, apakah angka 1600 itu adalah bottom, adalah keseluruhan atau mungkin angka itu berkembang lagi.

Kemudian yang saya ingin sampaikan minta tolong Apindo in total amount dalam jumlah yang sebenarnya, total PHK kita itu udah sampai seberapa pak, total PHK. Tadi kan Bapak menyebutkan secara sectoral, secara sektoral dan itu per kapan dan kalau diperkirakan misalnya pandeminya itu sampai tadi diukur oleh sekarang kan yang sudah keluar dari Singapura kita akan melewati sekitar September. Kalau itu sampai September dan sebagainya. Nah, karena begini fasilitas POJK yang diberikan oleh OJK itu kan hanya untuk debitur, debiturnya yang diberi. Sementara injeksi perbankannya kan. Itu artinya apa, sektor keuangannya kan akhirnya mati pak karena apa bayar simpanan tetep, bayar bunga tabungan tetep, dan sebagainya sementara dia tidak bisa menerima pokok dan bunga yang tadi. Nah injeksi ini harus dibutuhkan, tadi yang disampaikan oleh Pak Rosan kan baru sekitar 1600. Saya ingin tahu apakah 1600 itu angka, angka maksimumnya atau mungkin masih bisa berkembang karena kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan sektor yang tadi juga disebutkan oleh Pak Andreas yang ada di BPR, yang ada di non institusi keuangan, yang ultra mikro di PIP, terus yang ada di PNM, terus kemudian di pegadaian dan sebagainya ini kan di luar itu semua. Sementara mereka ini kan adalah orang yang terpapar, paling awal dari pandemi ini, dan saya berharap kemudian angka yang keluar dari Kadin ini kalau kemudian di-exercise tadi, ada Bapak yang sampaikan exercise-nya tadi saya yakin angka 1600 itu bukan angka dasar tapi ini bisa berkembang tergantung kepada apa.

Lah, pilihannya di Perpu ini juga dengan pemerintah memberikan kelonggaran kepada Bank Indonesia untuk membuka kesempatan kepada Bank Indonesia membeli surat utang negara dari Pasar Perdana ini sebenarnya tinggal dikuatkan dari sisi aturannya. Kemudian apa rencana pemerintah digunakan untuk apa dan seberapa besar ini penting pak karena sampai sekarang yang kita belum temukan itu adalah yang tadi sudah dijelaskan Kadin. Kalau Kadin bicara tentang paket ekonominya kita belum tahu mengenai bagaimana jaring pengaman sosial tadi sudah disebutkan oleh pak Ketua umum, jaring pengaman sosialnya ada. Untuk kesehatannya ada, nah sampai sekarang kita kenapa program seperti ini keluarnya dari Kadin bukan dari pemerintah, angka yang besar ini.

Nah ini nanti mungkin ini menjadi membuka perspektif kita untuk pemerintah lebih berani kembali dengan ruang yang diberikan oleh Undang-undang lewat Perpu nomor 1 tahun 2020 itu untuk memberikan daya dukung politik kita kepada pemerintah, kepada Bank Indonesia, termasuk kepada OJK, mengambil keputusan yang segera. Programnya apa, digunakan untuk apa, dan siapa yang akan menjadi lead sektornya. Nah ini pak kalau menurut saya, saya mengucapkan terima kasih pada Kadin berani membuka angka yang cukup besar ini sehingga perspektif kita terhadap kedalaman krisis ini, kedalaman permasalahan dan permasalahan yang harus dituntaskan dan dicari jalan keluarnya, pemerintah melakukan apa, DPR

melakukan apa, dan bisnis melakukan apa. Kalau menurut saya ini tinggal disinkronisasi Pak.

Itu saja pak Ketua, jadi ini membawa membuka khasanah pemikiran kita. Terimakasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.)

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Silakan Pak Rudi Hartono Bangun terakhir.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.)

Terimakasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota

Yang saya hormati dari Ketua umum Apindo dan Kadin

Saya singkat saja Ketua, tadi saya sudah panjang lebar mendengar. Ini inti utamanya kita sedang ada wabah gitu, sedang ada penyakit. Saya melihat beberapa bulan ini, hanya pihak pemerintah yang slbuk ya kan. Bagaimana mensiasati tadi alat Kesehatan, memblokade orang pulang mudik supaya penyakitnya jangan membesar. Yang saya ingin minta atau saran kepada Apindo, dimana peran Apindo dan Kadin dalam hal ini gitu, karena kalau tidak ada kekompakan, gotong royong, penyakit itu makin membesar gitu kalau tidak ada pasukan ataupun arahan dari pihak pengusaha, saya pikir ini jalan pemerintah pincang Ketua, Pimpinan. Jadi, saya ingin mengingatkan Apindo ayo sama-sama kita jangan memikirkan rugi terus Pak. Ya kan, pikirkan bagaimana masyarakat ini tidak jadi penyakitan, hilanglag itu wabah, kembalilah recovery gitu, karena ini yang dibahas ini kan bukan inti masalahnya. Kalau kita stimulus dikasih 1600 penyakit terus ada bangkrut negara ini pak. Coba pikirkan, kaji pak bagaimana selama ini Apindo, pengusaha-pengusaha ini bekerja selayaknya pemerintah.

Bagaimana menghempang itu wabah, bagaimana mengarahkan karyawannya supaya patuh seperti mungkin ya nggak usah jauh-jauh kesusu ngelihatnya mungkin seperti Singapura, seperti di Korea gitu, angka kematiannya kecil gitu, hingga badainya penyakitnya cepat berlalu gitu. Jangan merongrong pemerintah, pemerintah dirongrong minta uang sekian ya kan, sementara keadaannya lagi susah ini. Coba berpikir nggak pak Apindo ini dengan Kadin gitu, jangan kita pak. Bapak pasti dulu juga sebagai pengusaha dari nol tidak ada yang dikasih 1 triliun ataupun 10 miliar dulu, pasti dari puluhan juta. Pak Ketua juga sebagai pengusaha merasakan itu kan tapi kalau tiba-tiba seperti ini negara lagi susah masa mau dirongrong. Nah itu yang saya ingin ingatkan, mari kita gotong

royong pak ya kan. Mari kita bantu jangan pincang sebelah, pihak pemerintah saja yang bekerja gitu. Itu Ketua terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.)

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

(Pimpinan boleh boleh 2 menit Pimpinan)

Pak Sihar sebentar, tadi udah 2 2 nanti biar dari Kadin dan Apindo dulu silakan nanti setelah itu kalau ada

(1 menit aja 2 pertanyaan aja pendek aja)

Oke silakan. *To the point* ya, to the point langsung
(saya atau Pak Sihar pak)

F-PDIP (Dr. SIHAR P.H. SITORUS, BSBA, MBA):

Ketua, Kadin Pak Rosan, Ketua Apindo Pak Hari dan jajaran.

Terima kasih.

Saya punya dua pertanyaan aja, dan saya tertarik yang dikatakan Pak Rosan tadi tentang belum masuknya Capex di dalam penghitungan, dan dari Pak Hari tentang ada Green Zone dan Red Zone. Pertanyaannya adalah begini apabila pengusaha yang katakanlah sehat, mampu merestrukturisasi dirinya, kemudian diberikan suatu stimulus apakah pengusaha teman-teman pengusaha sanggup untuk melakukan ekspansi atau mengerjakan proyek yang berhubungan dengan capex karena sifatnya capex kan jangka panjang. Kemudian yang kedua terkait dengan Perpu ampakah teman-teman pengusaha merasa dengan adanya insentif pajak yang diberikan merasa terbantuan atau tidak.

Itu aja terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik terima kasih Pak Sihar kami persilakan Pak Rosan untuk memberikan respon dari pertanyaan Komisi XI setelah itu Pak Haryadi silakan Pak Rosan.

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Terimakasih, Pak Ketua.

Ya.

WATUA KOM. XI (Dr. ACHMAD HATARI SE., M.Si.):

Sedikit lagi dari Nasdem baru direspon oleh Pak Rosan sama Pak satu lagi Pak Haryadi. Pak Ketua yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi XI, Pak Haryadi ini di terkait dengan relaksasi pak ya ini relaksasi ini hampir 2 minggu berturut-turut Komisi XI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai asosiasi. Termasuk industri keuangan non bank, dan perbankan. Saya kemudian melihat di sini di ...(suara tidak jelas)... Apindo terkait dengan respon juga rekomendasi dari pada peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 memang dikatakan disini peraturan POJK ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020, namun menurut Apindo sampai dengan saat ini implementasinya masih berlarut-larut gitu, masih parsial pendekatannya pak. Sehingga juga ada rekomendasi dan respon dari Apindo disini sedikit kami memberitahukan kepada Pak Hariyadi dengan Pak Rosan relaksasi ini tidak bisa diberikan secara otomatis. Relaksasi diberikan harus ada permohonan dari debitur tentang kemudahan menyelesaikan bebannya, jadi memang yang namanya jatuh ke bawah tidak selamanya otomatis.

Pada saat rapat dengar pendapat dengan berbagai asosiasi dan industri jasa keuangan non bank, di situlah terungkap bagaimana kondisi likuiditas, bagaimana kemampuan membayar solvabilitas dari masing-masing mereka. Jadi ini tidak sama pak sehingga memang ini apa namanya respon ini benar pak dan ini tidak gampang dengan kondisi seperti begini pak ya, (suara tidak jelas) PHK (suara tidak jelas) begitu. Produksi juga macet dan lain-lain hanya saja saya ingin memperkuat lagi kepada Apindo bahwa, harus ada sinkron ini antara respon dari Apindo kemudian diperkuat lagi dengan rekomendasi jadi supaya itu ada benang merahnya. Apindo kemudian juga di rekomendasinya menyarankan terkait dengan THR itu dibayar cicil sampai dengan akhir tahun, THR itu kan untuk hari raya pak jadi kalau hari raya itu dibayar sampai akhir tahun bukan namanya lagi THR ini di rekomendasinya.

Jadi terkait dengan relaksasi seperti itu, sehingga kami Komisi XI mengetahui secara persis masing-masing kemampuan daripada mereka gitu bang. Ya barangkali direkomendasi ini pak perlu ada penekanan tentang kebijakan tadi seperti tapi barusan ini sudah ada apa namanya penekanan dari Presiden terkait dengan THR untuk Aparatur Sipil Negara, hanya diberikan kepada golongan 3 kebawah. Jadi artinya golongan 1, golongan 2 tidak diberikan THR dalam tahun 2020, itu aja tambahan pak makasih. Makasih pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik Pak Hatari silakan Pak Rosan silakan.

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Terima kasih pak Ketua dan pertama-tama saya mengucapkan terimakasih atas masukannya dan juga pertanyaannya dari seluruh Anggota dewan terhormat. Saya sangat mengapresiasi tentunya dalam hal ini usulan-usulan kami ini bisa di apa bisa ditanggapi dan juga ini adalah suatu bisa membuka suatu wacana yang bisa kita perdalam bersama dalam rangka kita menjaga kepentingan nasional dan keselamatan negara kita ini. Kalau diizinkan memang ada beberapa pertanyaan

saya tadi saya catat ada 14 pertanyaan tetapi ada beberapa juga yang saya lihat ini apa agak sama bersamaan concern-concernnya dan pertanyaannya dari Anggota dewan yang terhormat.

Saya juga akan menjawab ini secara padat dan singkat juga. Memang kalau saya lihat pertama dari beberapa hal usulan kami ini yang 1600 triliun ini sebetulnya juga sudah apa masalah quantitative easing ini atau pelonggaran kuantitatif ini juga sebetulnya sudah dilakukan oleh beberapa negara. Sudah ada mungkin lebih dari 10 negara yang melakukan kebijakan pencetakan uang ini walaupun saya menyadari tentunya kondisinya setiap negara berbeda-beda tetapi, seperti Jepang, Australia, beberapa negara Eropa termasuk US, Inggris, Tiongkok, dan yang lain-lainnya juga melakukan hal yang sama.

Yang kita lihat juga kita setuju semua bahwa masalah kesehatan ini harus kita tanggulangi bersama dengan cepat karena itu adalah masalahnya. Tadi ada dari Ibu Vera saya catat dan juga dari Ibu Indah bahwa dan Ibu wartiah dari PPP. Kita setuju kuncinya memang di rapid test ini baik itu rapid test kit atau swab test untuk kita mengetahui musuh kita ini, karena musuh kita adalah musuh tidak terlihat. Nah untuk kita bisa mengetahui atau terlihat memang rapid test kit ini harus dilakukan secara besar, cepat, dan masif sehingga kita bisa lebih memplanningkan dimana puncak-puncak atau sumber-sumber dari apa dari dari problem ini kesehatan ini. Sehingga memang itu harus diprioritaskan oleh sebab itu dari anggaran pemerintah yang kurang lebih 70 triliun kita meminta mencapai 400 triliun. Diantaranya seperti diutamakan untuk melakukan tes kit ini kami melihat itu adalah kuncinya dalam rangka kita mencoba memetakan apa musuh kita ini musuh kita bersama ini, dan kalau dari Pak Agung dan Pak Andreas memang ada kekhawatiran dan antisipasi tadi juga disampaikan juga oleh pak dan juga kekhawatiran mengenai rupiah melemah kita akan melemah disampaikan oleh Pak Mekeng, oleh Pak Kamrussamad dan Pak Jon. Kami mungkin agak berbeda mohon maaf kami mungkin dengan room for error juga kami melihat rupiah ke depannya ini akan menguat justru. Terlepas kita akan melakukan tindakan apa kenapa, saya contohkan. Di tahun 2008 kita ingat itu rupiah mulai menguat 2008, 2010, 2011 itu menguat kenapa pada saat itu pada saat resesi 2008, US negara Amerika itu melakukan *quantitative easing*, mencetak uang itu dalam dua tahap. Pertama 800 miliar dolar di tahun 2008, kemudian 700 miliar dolar sehingga total 1,5 triliun US Dolar dan mengajari pasar dan sudah termasuk ke Indonesia sehingga terjadi penguatan rupiah yang sangat besar pada saat itu di samping memang perekonomian negara kita juga sedang apa tidak begitu terdampak oleh krisis di 2008.

Sekarang US sudah mencetak duitnya kurang lebih 2,5 triliun US Dolar dan kami dari Kadin kita melakukan simulasi kita melihat rupiah akan menguat. Kami yakin itu Rupiah tidak akan ke 20.000 atau akan melemah kedepannya. Kami meyakini ini tidak, oleh sebab itu dari Bank Indonesia menyatakan rupiah akan 15.000 kami setuju, malah kami melihatnya mungkin akan di bawah dari 15.000 karena dari 2,5 triliun US dollar yang mulai dibanjirkan oleh Amerika oleh US 50 miliar dolar ke kita saja karena ini pasti akan berimbas keseluruh dunia. Makanya itu saya tidak khawatir rupiah akan melemah justru saya berkeyakinan rupiah akan menguat tapi tentunya saya mempunyai ruang untuk salah tapi ini adalah keyakinan dari kami.

Betul inflasi tentunya akan akan meningkat, tetapi kembali lagi tadi juga disampaikan oleh Mas Hari dan oleh kami juga bahwa kita melihat demannya ini

sekarang juga sedang lemah. Kamim melihat semua masyarakat embeli kebutuhannya tidak secara berlebihan, membeli kebutuhannya kebutuhan sehari-hari, tidaklah kita membeli sesuatu yang sifatnya untuk luxury good pada saat-saat seperti itu dan kita juga melihat bahwa perusahaan pun tidak melakukan investasi jangka panjang pada saat-saat seperti ini semuanya jadi apa melakukan penundaan. Jadi dan kalau kita lihat memang inflasi ini akan naik tapi tidak akan melonjak sangat signifikan. Inflasi ini akan naik memang kalau kita lihat juga memang ada kekhawatiran yang pemerintah saya baca juga mengenai nanti duitnya ada, barangnya tidak ada, tetapi kami lebih baik berpendapat barangnya mungkin sedikit tapi kita pegang berapa duit kita masih bisa cari barangnya daripada udah nggak ada barang, nggak ada duit, nggak bisa ngapa-ngapain.

Memang apa saya juga setuju dengan Pak Mekeng bahwa kita harus berani apa karena balik lagi tapi dalam keadaan seperti ini dan kita juga bisa mengukur kemampuan kita jadi kita harus berani menego hutang-hutang kita kedepannya dan kalau kita lihat bahwa saya menyarankan untuk kita dari Kadin dan pengusaha banyak menyarankan untuk kita apa melakukan quantitative easing ini dengan Bank Indonesia tentunya kami juga sangat menghormati inderpendensi dari Bank Indonesia tapi ini yang kita lihat adalah apa kepentingan nasional secara keseluruhan. Kalau kita lihat pada saat ini kalau kita mencoba ke pasar akan menjadi sangat sangat sulit dan kita lihat kemarin rupiah kita tertekan karena investor apa pemegang surat berharga negara kita yang pada waktu itu kurang lebih hampir 39% itu menjual obligasi apa menjual surat hutangnya ini dan dan dibeli oleh Bank Indonesia. Sehingga sekarang surat berharga surat berharga negara kita yang dipegang asing kurang lebih di level 32%.

Sedangkan average negara-negara lain, negara Asean itu dibawah 20%. Dengan harapan seperti ini kita memang meminta BI untuk step in untuk melakukan quantitative easing yang di mana kita bisa mensetting, bisa mensetting yieltnya atau bunganya di usulan kami adalah 1%, malah ada usulan 0%, kenapa karena bebannya itu bukan hanya kepada pengusaha tetapi itu dibebankan kepada masyarakat juga. Kenapa karena dari dana itu 400 triliun itu untuk kesehatan, 600 triliun untuk jaringan pengaman social. Jadi ini kan ya memang apa beda kantong ya tapi ini kan dari pemerintah dan memang pemikiran kami obligasi ini jangka waktunya tu ya mungkin agak panjang sekitar 8 tahun keatas. Tadi saya mungkin ingin juga apa menjawab dari sahabat saya bang Kamarussamad.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Izin Pak Rosan, Pimpinan izin sebentar mumpung disitu. Pak Rosan apakah dipastikan bahwa untuk 400 triliun itu termasuk di dalamnya adalah melakukan tes masif terhadap seluruh masyarakat sebanyak-banyaknya masyarakat?

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Iya betul sekali, justru itu poinnya bu. Betul sekali.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ya, tanpa itu kita nggak bisa itu menjalankan skenario apapun.

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Setuju Ibu, setuju. Oke. mohon izin saya melanjutkan. Skema ini apa Bangka bang Kamrussamad ini menyangkut semua termasuk UMKM, karena angka yang kami ambil ini adalah angka berdasarkan total pinjaman perbankan yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk UMKM yang kurang lebih adalah 1100 triliun atau hampir 20% dari total lending perbankan. Jadi kita pada saat ini kita tidak apa oh ini hanya untuk untuk pengusaha yang yang yang tanpa UMKM. Tidak-tidak justru ini melibatkan seluruh komponen yang yang harus di apa di diberikan stimulus. Tidak hanya untuk apa untuk industry tertentu saja atau kepada pengusaha tertentu saja tapi ini menyangkut semua apa, semua lapisan termasuk UMKM gitu dan kalau dilihat memang di Perpu ini 3 tahun apa perbaikannya karena sudah 3 tahun baru kembali ke defisit 3%.

Kalau kami melihat memang di dunia usaha walaupun insyaAllah masalah Covid-19 ini akan berakhir pada tahun ini tetapi dampaknya ke perekonomian ke dunia usaha ini akan berlanjut masih dirasakan sampai 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai 3 tahun kedepan karena ibaratnya kalau seperti orang yang baru sakit memang tidak bisa langsung berlari. Ada mesti berjalan pelan-pelan dulu kemudian apa baru dia bisa berlari. Memang kami melihat kami setuju dengan pemerintah karena proses pemulihannya ini tidak bisa instan gitu. Nah, oleh sebab itu kita harapkan jangan sampai dunia usaha ini mengalami berhenti karena faktor likuiditas atau faktor cash flow. Oleh sebab itu kebijakan ini quantitative easing ini sebetulnya bisa me-reset button lagi dari perbankan kita yang mempunyai pinjaman yang agak tinggi ke dunia usaha gitu. Jadi, termasuk UMKM jadi karena kalau kita lihat justru di perbankan yang yield-nya lebih tinggi yang ...(suara tidak jelas)... perbankan justru di UMKM secara *average* kami melihatnya.

Nah kemudian kepada Pak Hatari saya setuju memang ini terkena terdampak dan mitigasinya memang UMKM ini sebagai penyerap tenaga kerja memang harus diprioritaskan kami serius sekali karena pasar modal tadi ditanya memang terkena sampai sekarang per Januari sampai sekarang sudah ada koreksi kurang lebih sekitar 27% dan apa tentunya kita harus memikirkan bagaimana pariwisata yang merupakan kontribusi nomor 2 pada saat kita (suara tidak jelas) negara kita ini untuk segera bisa kembali *rebound* dengan dengan cepat gitu ya. Saya hanya mau tambahkan walaupun tadi pertanyaannya ke mas Hariyadi mengenai POJK nomor 11 kalau saya bicara dengan bank-bank kadang-kadang itu problemnya adalah mereka bilang proses restrukturisasi ini belum bisa mereka jalankan karena menunggu juklak juga dari OJK, karena karena keadaan PSBB sekarang untuk melakukan restrukturisasi mereka bilang ini kan tidak bisa bertemu. Jadi harus secara boleh dibilang secara virtual gitu ya, sehingga pengajuannya apakah tanda tangan secara virtual itu bisa secara resmi jadi memang beberapa ada aturan yang musti disesuaikan dengan keadaan PSBB seperti sekarang ini.

Apakah bisa melalui apa zoom atau yang lain itu juga yang menyebabkan salah satunya proses restrukturisasi ini agak terlambat gitu dan saya juga setuju pada Ibu Ela bahwa moral hazard itu adalah yang yang harus kita utamakan untuk

jangan sampai terjadi. Kami setuju sekali karena kami pun mengakui tidak semua pengusaha juga baik semua pasti ada saja yang apa yang yang mempunyai moral hazard tentunya ya usulan kami, berikanlah mereka penalti atau blacklist sebesar-besarnya apabila mereka melakukan *moral hazard* karena kami pun sudah bukan hanya menghimbau tapi secara terbuka dan secara tegas kepada teman-teman pengusaha bahwa kita sama sekali tidak boleh ada benturan kepentingan maupun *moral hazard* dalam keadaan apapun apalagi di saat-saat seperti ini.

Kemudian dari Ibu Vera dari Demokrat, saya setuju sekali Bu kembali lagi niat baik akan menjadi kuncinya dalam kita menghadapi apa Covid-19 ini dan memang usulan kami ini harus benar-benar di di di apa terukur, kemudian dipelajari dampak-dampaknya dan tentunya ini adalah suatu masa yang tidak-tidak mudah buat kita semua tetapi tentunya harapan kami usulan kami ini apa bisa menjadi suatu wacana yang bisa dipelajari lebih dalam dengan baik sehingga pengambilan keputusan pun bisa mengambil keputusan ini dengan dengan baik dan cepat.

Pada Pak Jon, ya memang doa nih pak di saat-saat seperti ini karena ini adalah waktu yang tidak mudah, tidak gampang dan kalau memang sudah ada beberapa kebijakan dari Bank Indonesia termasuk pelanggaran GWM dan itu memang melonggarkan likuiditas kurang lebih 120-140 apa miliar dan ini sangat sangat membantu tetapi memang kebijakan sektor fiskal, moneter, penguatan sektor riil, dan perbankan adalah suatu kebijakan yang harus dilakukan secara komprehensif dengan dengan dengan tidak mengorbankan salah satu pihak, jadi ini coba kita selaraskan, dan tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa kami justru tidak khawatir mengenai dollar akan menguat justru kami mempunyai keyakinan rupiah yang akan menguat dalam beberapa waktu kedepan ini walaupun ada kemungkinan saya salah mengenai itu tapi dan kami lihat sekedar rupiah bisa menguat dan saya setuju bahwa ya resiko itu semua harus bisa terukur, bisa dihitung dan apa dampak-dampaknya terhadap perekonomian kita.

Kepada Ibu Wartiah mengenai pariwisata tadi masukannya juga sama rapid test perlu ditambahkan karena itu adalah hal yang prioritas yang harus kita lakukan dan saya setuju sekali dan implementasinya harus cepat. Setuju sekali dengan Ibu Wartiah terimakasih atas masukannya, tadi juga dari Ibu Indah sama kurang lebih rapid test kit adalah kuncinya alokasi anggaran memang harus difokuskan justru dari 400 triliun itu dalam kesehatan mengenai bagaimana kita meningkatkan rapid test kit ini secara cepat dan juga secara massif.

Kemudian kepada Pak Didi memang alkes perlu segera di dipercepat dan ditambahkan segala pihak kalau di saat ini memang masker sama APD yang sudah bisa diproduksi oleh kami oleh bidang usaha tetapi sekarang dengan ventilator yang kita dengar sekarang dari Pindad juga sudah mulai akan membuat ya mudah-mudahan industri dalam negeri pun dapat berkontribusi juga terutama dalam kita apa memerangi faktor kesehatan. Kepada Pak Elnino, memang pertanyaannya stimulus ini untuk untuk kalau kami melihatnya gini Pak dari stimulus yang sudah diberikan ini, kita ini untuk bertahan pak bukan kita untuk ekspansi. Nah, dengan stimulus ini kita bisa bertahan paling tidak kita bisa tumbuh 1 sampai 2%. Kalau tidak ada stimulus ini kami running numbernya kita bisa 3 4 % pak. Tanpa stimulus ini dan dampaknya pastinya akan signifikan atau kita untuk recover lagi taking apa lebih banyak apa lebih banyak apa untuk recovery-nya sehingga menjadi lebih panjang. Kalau tampak ada jadi kalau kita lihat juga pada awal dulu waktu Covid-19 ini baru mulai, pemerintah masih mengatakan mungkin Menteri Keuangan Oh mungkin dari 5% kita ya turun ke 4,7. 4,7 kemudian turun lagi ke 2,3 jadi kalau kita

lihat makin panjang ini masalah Covid-19 dampaknya kepada perekonomian kita memang makin besar.

Kemudian kepada Pak Misbakhun kalau melihat memang sekarang Pak Misbakhun 1600 triliun ini menurut pendapat kami bisa melebar ke angka yang lebih besar lagi. Kembali lagi apabila penanganannya ini agak lama dalam hal Covid-19 ini 1600 itu bisa membesar. Tadi saya sempat sampaikan sedikit kalau kita berasumsi 6 bulan saja untuk bunga dan pokok itu untuk perbankan kurang lebih 1650 triliun yang dimana kita mengambil angka mungkin sudah saya sampaikan di paper saya 6000 triliun itulah total pinjaman perbankan ke pihak ketiga, yang di mana kalau kita asumsi 10% 600 triliun, selama 1 tahun kalau kita asumsi 6 bulan 300 triliun kita asumsi 50% terdampak di perbankan sehingga menjadi 150 triliun itu hanya untuk bunganya saja dengan pokoknya ditambah 1500 triliun. Jadi kalau 6 bulan itu bisa 2600 totalnya 2650 triliun dalam jangka waktu 6 bulan dan kalau ini berkepanjangan kemungkinannya bisa menjadi lebih besar lagi dan oleh sebab itu kami pun mengusulkan jaring pengaman sosial yang yang yang 110 triliun itu ditingkatkan menjadi 600 triliun untuk bisa mengantisipasi itu semua, dan PHK memang makin meningkat dan yang dirumahkan lebih bisa lebih gila ini yang dirumahkan hanya beda seminggu dari KeMenterian Tenaga Kerja saya inget dari 1,5 juta orang sekarang sudah 3,5 juta orang dalam waktu 1 minggu, dan ini apa kami mencoba menghitung ini bisa berdampak bisa ada penambahan kurang lebih sampai 30 juta orang yang bisa terdampak apabila ini berkepanjangan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ijin Pimpinan boleh Pimpinan setengah detik, 1 detik. Pak Rosan apakah ada hal-hal yang selain ini yang pesimis tadi tentang penambahan-penambahan beban kita yaitu untuk apa yang dipikirkan oleh Kadin dan Apindo untuk sektor usaha yang masih bisa survive atau dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka itu Pak Rosan.

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Oke, terima kasih Ibu. Memang di saat-saat seperti ini ya ada sector-sector yang masih bisa tumbuh dan berkembang dan kalau kita lihat juga kreativitas apa dalam hal seperti ini sebenarnya juga makin tumbuh. Ini juga membuat banyak industri ini untuk lebih mengenal teknologi, sehingga banyak juga dunia usaha ini yang yang tadinya terdampak besar ya kayak mungkin paling gampang adalah pada tekstil sekarang dengan APD dengan masker mereka sekarang itu cukup membantu mereka beralih kesitu.

Kemudian saya dapat juga seperti barista yang penyediaan kopi ini yang tadinya mereka tidak apa terdampak tapi di bulan puasa ini mereka menjual dalam bak besar mereka kirim ke apa ke rumah-rumah ternyata itu juga bisa menolong walaupun masih jauh dari yang biasa mereka lakukan. Jadi kreativitas ini terus berkembang dan kita harapkan kita juga harus sudah mulai terbiasa dengan keadaan seperti ini karena mungkin kita akan lagi masih menjalani ini sampai berapa bulan kedepan dan juga mungkin ada beberapa hal yang akan secara permanen yang akan kita lakukan seterusnya gitu ya. Mungkin kita akan lebih menjaga kebersihan kita, mungkin kita akan lebih terbiasa dengan melakukan zoom

conference nantinya iya dna ini juga menjadi hal positif juga sekarang kita jadi buka puasa alhamdulillah di rumah terus tiap hari gitu. Itu yang di mana mungkin sebelumnya kita tidak terbiasa melakukan hal ini di tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian masih ada 2 lagi dari Pak Rudi Hartono dan dari Pak Sihar. Ya memang dari Pak Rudi di saat seperti ini kami setuju semua pemangku kepentingan harus bersama-sama karena ini adalah keadaan yang sulit. Kita pun bersama-sama harus bergotong-royong dan kami melihat stimulus ini harus diberikan kepada semua. Kita juga apa karena ini berdampak hampir semua sektor tentunya niat baik harus kita dahulukan dan kami pun juga berupaya menghimbau dan juga mengumpulkan dana untuk membantu rekan-rekan kita dalam rangka kita menghadapi ini bersama-sama, tapi saya senang sekali bahwa kita memang inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita saling bahu membahu dan bergotong-royong.

Terakhir kepada Pak Sihar mengenai pertanyaannya mengenai capex, kalau capex Pak Sihar tentunya kita akan butuhkan tapi mungkin tidak dalam tahun ini. Tahun ini kita adalah mungkin menyelamatkan, menjaga likuiditas terlebih dahulu tapi tentunya capex akan kita butuhkan di tahun-tahun depan karena harapan kita pada saat nanti semua sudah kembali sehat kan kita juga usaha harus berjalan dan kami menghitung bahwa capex ini diharapkan bisa datang dari dari sektor keuangan termasuk perbankan. Sehingga kembali ke Pak Misbakhun, angka itu bisa bertambah dengan kebutuhan capex juga yang kita perkirakan akan sangat diperlukan dalam rangka usaha kecil menengah ini kembali bangkit, kembali bergerak dan juga seluruh dunia usaha pada tahun-tahun kedepannya.

Ya memang sudah ada stimulus PPH seperti PPH 21, 22, 25, kami lihat itu sudah baik tapi kami ingin itu diperluas memang oleh Menteri Keuangan di PPH 21 itu sudah diperluas ke 18 sektor. Kami lihat mungkin ini perlu diperluas lagi jadi mengenai PPH 25 itu jangan hanya dibatasi sampai 30% tapi bisa diberikan penundaan sampai 100%. Sifat ini hanya penundaan saja jadi harapan kami kami pun sudah mengkomunikasikan ini dengan dengan pemerintah dan juga dengan Menteri-Menteri terkait.

Mungkin dari saya itu dulu apa
(interupsi)
(ya Pak Ramson ya)
(ya silakan)

F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Ya Pak Rosan, saya belum tanya jawaban tentang devisa hasil ekspor yang masih diparkir di luar Kenapa karena ini sangat besar angkanya. Ini selalu disampaikan oleh Bank Indonesia kalau presentasi di Komisi XI, kita supply dollar itu jauh lebih kecil daripada kebutuhan. Makanya dolar kita tidak pernah bisa turun. Saya berani yakin dolar kita enggak akan turun. Yang turun kemarin itu karena Bank Indonesia intervensi secara berkala yang sudah menghabiskan anggaran devisa itu 350 triliun. Kalau tidak ada intervensi dari Bank Indonesia dolar kita mungkin udah sampai 18 sampai 19.000. *Currency* itu kalau dibawa dengan persepsi, presepsi bawa ekonomi lagi drop segala macam semua orang akan pegang dollar.

Jadi bukan karena perasaan tetapi memang *demand and supply* dolar kita di negara kita ini masih jomplang. Ini basisnya adalah data-data dari Bank

Indonesia. Ini yang saya harapkan dari Kadin coba kumpulin dong pengusaha-pengusaha besar yang masuk kedalam Forbes-Forbes itu untuk mereka mengconvert dolarnya kedalam rupiah itu salah satu cara untuk membantu supply dolar kita dan rupiah kita.

Dan yang kedua kalau sekarang digelontorkan uang ke dalam system, itu tidak serta-merta ekonomi akan bangkit karena demand and supplynya pun belum ada. Kalau pabrik-pabrik dihidupkan kemudian dia memproduksi alat-alat produksi hasilnya yang beli siapa. Mau di ekspor ke luar, di luar negeri pun masih lagi susah. Paling yang sekarang yang bisa yang bisa kita gairahkan sekarang adalah yang pemerintah harus lakukan adalah mempertahankan daya beli masyarakat itu yang penting. Selain Covidnya dicoba di di di di dimonitor daya beli masyarakat ini harus dipertahankan melalui program-program bansos. Kalau daya beli masyarakat sudah ada apa yang diproduksi oleh para pengusaha tentu akan dibeli oleh masyarakat. Jadi kita harus melihat dari sisi itu juga.

Saya berharap Kadin mengambil inisiasi mengundang semua pengusaha-pengusaha yang duitnya masih di luar negeri dan itu saya yakin masih banyak mereka yang menggelontorkan dolarnya ke sistem kita ditukar ke rupiah dan itu akan menjadi banjir lagi rupiah kita, tapi kalau langsung tiba-tiba kita disuruh BI, BI itu sudah keluarin uang 350 triliun sejak Covid ini, dan mereka ada batasnya tidak bisa lagi mengeluarkan itu karena mereka harus menjaga kebutuhan ekspor impor kita. Itu Pak Rosan, makasih Ketua.

(baik)

KETUA UMUM KADIN INDONESIA (ROSAN ROESLANI):

Ya terima kasih Pak Mekeng atas masukannya. Perlu saya tambahkan juga saya setuju sekali dengan Pak Mekeng devisa hasil ekspor tuh harus masuk Indonesia sebagai informasi saja malah kami yang mengusulkan itu Pak Mekeng. Kita mengundang para pengusaha termasuk pengusaha besar dan kita sebelum krisis ini saya masih ingat kita kumpulkan di apa di suatu tempat di hotel Westin, untuk mereka seluruh pengusaha untuk mengkonversi dana hasil ekspornya ke rupiah. Jadi kemudian diendapkan dulu, saya setuju sekali itu dan memang ini terima kasih atas masukannya ya tentunya harapan kami kedepannya ekonomi akan menjadi lebih membaik, terima kasih Pak Mekeng.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Baik terima kasih Pak Rosan. Mungkin Pak Haryadi silakan Pak Hariyadi.

APINDO (HARIYADI):

Ya terimakasih Pak Dito. Saya mencoba melengkapi dari apa yang sudah dijawab oleh Mas Rosan tadi ya. Kalau untuk pertanyaan Pak Andreas saya rasa sudah dijawab semuanya oleh Pak Mas Rosan jadi saya pikir tidak perlu saya ulang lagi. Mengenai Pak Melki, menariknya Pak Melki tadi menyampaikan dana milik pengusaha yang di luar negeri agar dimasukkan ke dalam negeri. Menurut saya Pak Melki ya, saya pikir dengan adanya tax amnesty tempo hari mustinya

keterbukaan tentang figur profil basis keuangan masing-masing pengusaha itu sangat apa sudah sangat terbuka ya, karena seingat saya catatan saya dulu deklarasi untuk harta saja 4855 triliun di mana 3676 triliunnya itu didalam negeri dan yang luar negerinya 1031 triliun. Repatriasi repatriasi nya 147 triliun.

Apindo dulu termasuk yang sangat getol gitu yang mendorong tax amnesty karena kami juga mikir bahwa kedepan itu kalau kita tidak memiliki transparansi dari rekan-rekan pengusaha kita maka juga tidak fair untuk negara kita. Jangan sampai rekan-rekan yang sudah berjuang betul untuk kemajuan Indonesia tapi terus ada juga penumpang free rider ya kalau saya bilang. Penumpang gelap tapi free rider, maunya gratis aja naruh uangnya diluar. Jadi, saya sependapat sekali Pak Mekeng, kalau saja kita mendapatkan data itu juga akan membantu kami untuk berbicara langsung dengan para pihak karena terus terang selama ini kita nggak pernah ada pembicaraan dari pihak pemerintah seperti yang Pak Mekeng minta gitu.

Kita pengen tahu sih siapa sih orangnya gitu karena yang punya datanya kan pemerintah. Kalau kita tahu kita bisa akan selesai juga diselesaikan secara adat lah gitu kalau istilah kita ya karena juga terus terang kami juga ngerasa jengkel juga kalau misalnya ada yang apa masih ada yang ya artinya cuman narik aja gitu ya narik aja keuntungan dari republik kita terus ditaruh di luar dengan alasan sendiri dan sebagainya. Jadi, menurut saya karena pemikiran kami dulu dengan tax amnesty pemerintah sudah punya basis data yang sangat bagus karena dulu saya inget kami juga mohon maaf sebagai pengusaha juga kadang-kadang kuping marah juga ya diserang terus kan punya dana 1000 apa 14000 triliun di luar negeri dan sebagainya. Semuanya itu kan hanya bisa dijawab dengan system, dengan system dengan sekarang juga ada automatic exchange information. Sekarang juga udah mulai ketahuan tuh Pak Melki yang pada bandel-bandel udah mulai ketangkep-ketangkep juga. Kadang-kadang memang seperti itu sudah terjadi automatic exchange information. Jadi, ini memang menjadi PR kita bersama lah.

Kita membangun republik itu harus ya sakit dan gembiranya harus bersama-sama. Kalau kita gembira ya gembira semuanya, happy semuanya tapi kalau kita sedang sakit ya semuanya harus memikul. Jadi itu saja Pak, jadi kalau dari memang ada kesempatan itu ada bagusnya juga kita pengen tahu siapa sih yang masih yang masih apa dalam tanda petik ya masih bandel itu karena saya inget PMK juga ada kan yang mengatur mengenai insentif-insentif untuk dana yang ditaruh itu akan diberikan insentif dari PPH dan sebagainya. Ya pak Melki.

F-P GOLKAR (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Saya interupsi, Pak Hariyadi coba rapat dengar pendapat dengan Pak Bambang Brodjo aja, karena beliau itu yang waktu itu menginisiasi tax amnesty menyatakan itu di depan public bahwa ada (suara tidak jelas) triliun. Nah itu tolong ditanya dia aja. By name, by address, dan by handphone katanya silakan aja tanya.

APINDO (HARIYADI):

Betul pak dan itu sayangnya gak pernah terjawab Pak Melki, jadi udah didepan public kita juga ngejar pak karena situasinya itu kan juga aduh ini gimana sih sebetulnya gimana. Jadi yang udah cerita lama ya pak karena kami juga rasa

(yang tahu Pak Ken itu sebenarnya)

Kenapa? Iya iya, Pak Ken Dirjen Pajak dulu ya.

(sanding aja target dan realisasi WP dan jumlah yang realisasi itu)

Intinya kita tentunya sangat mendukung lah intinya dari kami dulu begitu kok kita pengennya terbuka semuanya karena kita merasa juga nggak *fair* ada yang patuh tapi ada juga yang nakal gitu kalau kita pengennya semua ya *in the same plant field* dong. Kalau semuanya masuk di dalam di dalam tataran permainan yang aturan mainnya sama tentu akan lebih fair untuk semuanya. Jadi kami sangat mendukung sampai hari ini Pak Mekeng. Sebetulnya kita ingin betul-betul *the fair playing field* kita semua.

Nah lalu apa sahabat saya nih Mas Kamrussamad, saya ada pertanyaan mengenai apakah kebijakan fiskal ini sudah dirasakan oleh sektor riil. Yang sudah dirasakan itu adalah untuk industri pengolahan karena sudah keluar ketentuannya tapi untuk sektor yang lain salah satunya adalah sektor yang paling parah itu adalah di pariwisata. Jadi pariwisata dulu waktu sebelum pandemi memang sudah keluar tapi tidak efektif itu tidak apa tidak sempat dieksekusi. Nah ini sekarang kita lagi menunggu entah kapan akan dikeluarkan katanya menjadi 18 sektor. Jadi kalau boleh kami sampaikan sudah ada yang apa merasakan apa efektifitas dari kebijakan tersebut tapi sektornya masih sangat tertentu sepengetahuan saya adalah sektor industri pengolahan dan yang berbasis orientasi ekspor. Jadi ini juga masih sangat terbatas.

Lalu juga mengenai Perpu nomor 1 ini isyarat untuk pemulihan dalam waktu 3 tahun, betul bang Samad kita juga sudah memperhatikan betul jadi saya juga sependapat gitu ya dalam isi Perpu itu. Memang kira-kira itu perlu waktu agak Panjang, jadi kalau kami sempat kemarin berdiskusi dengan teman-teman dari United Nation World Tourism organization, jadi bidang pariwisatanya PBB itu dia mempunyai data bahwa SARS dulu itu di sektor pariwisata saja perlu waktu 7 bulan gitu untuk recover yang apa penularannya masih terbatas ya. Nah ini mungkin masuk akal kalau waktunya itu juga panjang dan kita memang sekarang kembali lagi akan menyesuaikan kalau memang pemerintah sudah tidak ada masalah hukumnya karena sekarang ini kami melihat masih sangat terlihat keragu-raguan daripada pemerintah khususnya Menteri Keuangan menunggu daripada hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi itu bagaimana hasilnya, dan tadi yang menjawab Pak Mekeng tadi hampir sama dengan Bu Ela ya saya enggak usah jawab punya Bu Ela.

Jadi ini mengenai Pak Hatari jadiantisipasi mitigasi risiko untuk sektor yang rentan terdampak ini yaitu khususnya UMKM ini memang terus terang Pak UMKM ini memang paling berat ya. Dalam arti kata karena mereka itu kan yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat, artinya barang dagangannya mereka barang produknya mereka itu adalah betul-betul sangat dekat dengan masyarakat dan sekarang dengan adanya PSBB, dengan adanya masyarakat yang ketakutan ini memang menjadi masalah. Makanya kami dalam usulan kami, kami mengusulkan memang perlu adanya penyekatan yang lebih ketat ya zona merah, zona hijau. Ini juga untuk me apa namanya untuk membiarkan supaya ekonomi itu bisa tumbuh dan memang menarik Bapak Ibu sekalian kalau saya pribadi melihat kondisi Indonesia, ini kan ada pendekatan kalau boleh saya lihat ada tiga pendekatan. Yaitu adanya lockdown, pendekatan secara ketat pokoknya semua orang di kunci ya kayak China lah. Kayak China, nah lalu ada yang setengah lockdown seperti kita, lockdown iya dibatasi tapi tidak masih ... (suara tidak jelas)...

seperti di Wuhan. Lalu yang ketiga itu ada herd immunity, orang dibiarkan apa namanya mempunyai kekebalan sendiri itu seperti di Swedia.

Kalau kami melihat mohon maaf kalau pendapat saya salah dengan segala kerepotannya di kita mungkin kita akan menuju yang ketiga gitu herd immunity. Terlepas kita setuju atau tidak setuju karena ya itu tadi kedisiplinannya, komitmen dan sebagainya kami melihat aduh kayaknya kok berat gitu ya. Nah ini yang mungkin, makanya saya bilang tadi mungkin dibikin *buffer-buffer*, *cluster-cluster* zona hijau yang misalnya ada kata lah 1 zona hijau itu tidak harus provinsi ya atau misalnya kabupaten. Misalnya kabupaten mana, Tasikmalaya misalnya kita ambil itu nanti tapi zona hijau itu diperbesar, step by step diperbesar sehingga ada yang emang emang punya daya tahan yang apa namanya kebal tapi yang memang kena itu kita sudah siapkan juga harapan kami fasilitas kesehatan yang memang juga memadai.

Tadi Mas Rosan juga bilang Pindad sudah bikin ventilator, kebetulan juga saya tahu juga ITB juga itu lagi bikin. Itu adalah ventilator yang dipakai bukan yang seperti di namanya di ICU tapi justru itu ventilator untuk pertolongan pertama sebelum orang itu menjadi lebih berat gitu. Jadi ini juga menarik jadi bagaimana caranya orang itu begitu sakit terutama di system pernafasannya bisa diantisipasi lebih awal, sehingga jangan sampai dia itu parah ke ICU. Jadi sekarang ini yang parah-parah itu kan karena memang penanganannya terlambat semua.

Nah ini ini pendapat kami jadi memang kita suka tidak suka ya ini akan terjadi rakyat kita begitu banyak disini dan disiplinnya juga aduh minta ampun juga ya itu keadaan kita. Makanya menurut pandangan kami kita juga harus aktif, zona hijaunya itu ditentukan dimana kita jaga dengan protokol yang ketat disitu. Pasti ada yang ...(suara tidak jelas)... juga di zona hijau tapi itu tadi dengan kita pola seperti itu jadi bukan dibalik apa kita semuanya kita jadikan zona merah yang akhirnya semuanya ekonomi mati tapi kalau kita tetapkan zona hijau dan pelan-pelan kita *growing* kita perbesar zona hijau itu insyaAllah memang akan tertanganilah paling tidak. Paling tidak kita ada kepastian. Kalau seperti ini kita juga repot PSBB, semua daerah PSBB tanpa juga kita mengetahui kapan kita seperti tadi apa Ibu Ela yang menyampaikan juga masalah tadi rapid test, Bu Indah juga itu kita juga sampai hari ini juga kan kita nggak tahu untuk mendeteksi itu seperti apa. Jadi hal-hal itulah yang menurut pandangan kami perlu kita memang harus realistis juga melihat kondisi ini tanpa juga kita harus kehilangan keberanian untuk kita melangkah tapi tentu harus dengan protokol kesehatan yang benar.

Ya tadi untuk Pak Hatari masalah UMKM gitu pak agak susah karena memang dia karena

(interupsi Ketua)

Ya Bapak.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.)

Interupsi sebentar pak Ketua, pak Ketua apindo kan tadi nyebut rapid test. Jadi bagaimana perannya pengusaha ataupun industri ataupun dunia usaha apa mengarahkan karyawannya untuk merapid test masal. Kan belum ada ini gerakan dari pengusaha yang merapid test karyawannya di kantornya, di hotelnya massal. Jadi di cluster akhirnya kan pemerintah membuat, pengusaha membuat, akhirnya semua seperti Korea itu banyak yang di rapid, banyak yang ketahuan, bisa

ditanggulangi gitu Pak. Sekarang kan pihak pengusaha di mana Pak saya mau tanya Bapak ini, ada enggak instruksi ke Kadin-Kadin ke pengusaha-pengusaha dibawah? Nah ini saya ingin ingatkan Bapak ini Kadin dan Apindo juga seperti pemerintah Pak jadi kita sama-sama menyerang ini kuman gitu wabah. Kalau enggak cuman separuh yang kerja pak, pemerintah doang nggak ada efeknya gitu nanti lari kesana-kemari penyakitnya pak. Saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

Selanjutnya silakan Pak Hariyadi.

APINDO (HARIYADI):

Ya baik Pak Rudi sedikit karena baru interupsi jadi masalah rapid test ini Bapak, kita tuh juga kesulitan Pak. Yang mengimpor rapaid test ini adalah yang sudah mendapatkan approval dari Kemenkes itu yang kami tahu. Jadi ada beberapa temen-temen justru kita ini juga termasuk yang kesulitan untuk mencari itu gitu Pak. Jadi ini yang juga sedang kami bicarakan bagaimana caranya paling tidak yang dari swasta karena mereka juga punya kepentingan sendiri itu seharusnya juga di apa diperbolehkan untuk mendatangkan rapid test itu tapi kenyataannya di lapangan itu tidak seperti itu Pak. Kami sendiri pun juga mengalami kesulitan untuk perusahaan saya kebetulan perusahaan saya juga menerima tenaga medis pak jadi saya juga harus waspada betul itu kemarin aduh termasuk sulit pak untuk mendapatkan rapid test. Akhirnya kami dibantu oleh beberapa rekan yang kebetulan akhirnya kita ketemu importir dari Korea Selatan kita dapat dan itupun juga terbatas. Jadi, mohon maaf Pak Rudi jadi kita memang sudah mau tapi memang aksesnya ini yang kelihatannya memang harus dibuka Pak.

Jadi sekarang ini sulit sekali untuk untuk masalah khususnya rapid test ini kita mendatangkan secara walaupun secara perusahaan itu kelihatannya tidak mudah karena harus dikontrol oleh KeMenterian Kesehatan, dan kalau yang peran kita itu Insya Allah pak kita selama ini apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Protokol kesehatan itu juga udah kita lakukan di apa terutama perusahaan-perusahaan yang masih berjalan itu protokol kesehatannya udah sangat-sangat kita kedepankan mungkin kalau Bapak Ibu datang ke toko-toko apa buah atau swalayan yang sekarang ini sudah jalan juga Bapak Ibu bisa lihat semua kelengkapan protokol kesehatan disana sudah ada. Jadi kami intinya tentu kami sangat ingin mendukung sekali hanya memang akses-akses itu yang kami perlukan.

Demikian, lalu selanjutnya adalah dari Pak, Ibu Ela tadi saya rasa sudah udah dijawab hanya sedikit masalah sektor pariwisata stimulusnya itu kami masih menunggu karena sampai hari ini belum dikeluarkan Bu untuk jadi kita belum sama sekali sektor pariwisata yang paling terdampak sampai hari ini kita belum dapat. Baik itu yang namanya PPH 21, 25 maupun juga pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran itu dari pemerintah pusat tidak efektif bu. Jadi kami bernegosiasinya adalah dengan pemerintah daerah dan ini sudah di kami sudah menyurati di seluruh Gubernur di Indonesia dari ...(suara tidak jelas)... Indonesia. Beberapa sudah ada respons tapi mayoritas masih belum respon untuk

membebaskan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, serta penundaan serta penundaan untuk pembayaran PBB.

Lalu saya rasa tadi sudah terjawab Pak dari Pak Rosan untuk Bu Wartiah dengan Bu Ela sama bu ya sector pariwisata. Perhatiannya memang mohon maaf rame di berita tapi sebetulnya kita belum terima. Bahkan juga kami meminta untuk pembayaran PLN tidak jalan karena sampai hari ini kita masih membayar minimum charge bu. Jadi itu ada yang 40 jam per bulan ada yang sampai dengan 230 jam per bulan itu kita masih dikenakan walaupun hotelnya tutup.

Lalu mengenai Pak Elnino Mohi kalau pemerintah tidak memberi stimulus apakah ada secercah harapan. Menurut pandangan kami dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, mau tidak mau pemerintah harus turun tangan. Seperti tadi Pak Mas Rosan tadi menyampaikan karena mayoritas daripada dunia sektor usaha kita itu memang betul-betul collapse dalam arti kata dia tidak mencatatkan lagi penjualan. Jadi tidak ada uang masuk jadi kalau memang di tidak diberikan stimulus akan sulit. Memang masih berjalan seperti tadi Mas Rosan sampaikan tapi itu sangat kecil Bapak Ibu sekalian, membuat APD, membuat sanitizer. Memang jumlahnya banyak tapi sektor yang menikmati itu relatif kecil tidak sebanding dengan collapse-nya sector riil kita secara keseluruhan, dan pak mas Misbakhun ini juga menarik. Total PHK kita berapa, kita masih menunggu laporannya BPJS Ketenagakerjaan bulan ini Mas Kun jadi yang paling bisa kita percaya itu sekarang itu kalau data PHK itu adalah BPJS Ketenagakerjaan karena dia lengkap ya datanya jadi kita akan melihat disana dari tren yang nggak bayar nanti kita akan lihat disana. Jadi kalau kita mau lihat totalnya berapa kami juga masih menunggu mudah-mudahan nanti awal Mei kita sudah tahu persis kira-kira perkiraannya berapa.

Oh ya ini bukan PHK tapi adalah menurut pandangan kami karena kalau PHK tadi saya sampaikan tidak memungkinkan karena kita harus bayar pesangon dalam kondisi seperti ini perusahaan tidak punya dana untuk pesangon. Jadi yang terjadi adalah mereka itu dicutikan diluar tanggungan perusahaan. Nah kalau dicutikan diluar tanggungan perusahaan itu sebetulnya sama aja setengah PHK juga sih karena nggak dapat pekerjaan juga, tapi itu akan bisa terdeteksi dari perusahaannya apakah perusahaannya masih sanggup membayar iuran nggak kalau membayar iuran dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan itu kemungkinan karyawannya sudah dirumahkan.

Lalu berikutnya Pak Sihar mengenai Perpu Nomor 1 apakah membantu, nah tadi juga kita masih nunggu bagaimana posisi dari pada pemerintah karena kembali lagi masih dijalan masih di MK. Saya juga tidak tahu persis yang 405 triliun itu tuh apa sudah bisa diproses atau belum dengan kondisi Perpu sendiri sebagai dasarnya masih bermasalah. Jadi kalau boleh kami sampaikan rasanya sih Perpu ini juga masih belum kita bisa merasakan apa efektifitasnya bagi sektor riil.

Nah terakhir untuk Pak Hatari mengenai masalah POJK tersebut nomor 11. Jadi begini pak memang relaksasi ini berdasarkan permintaan betul Pak. Memang sekarang ini justru perusahaan itu sudah meminta kepada perbankan tapi perbankannya sendiri itu tadi yang kami sampaikan. Ya bisa dipahami karena mereka itu nomor 1 harus menjaga kondisi likuiditas banknya sendiri. Kedua adalah juga ada problem terkait dengan tenaga. Tadi Mas Rosan juga sudah menyampaikan kerepotan dengan apa work from home. Dengan jumlah nasabah yang tiba-tiba minta penjadwalan segitu besar itu kan tidak mungkin dikerjakan dari rumah ya ataupun dari kantor yang personilnya masih dibatasi. Jadi itu juga

permasalahan yang kami hadapi dan yang bikin kami sulit itu adalah dengan tidak ada kepastian penyelesaian jadwal ini jadinya apa menimbulkan juga semacam ketidakpastian hukum juga Pak. Ini yang sebetulnya kita khawatirkan jadi kami juga berharap apa penyelesaian ini bisa segera kita selesaikan karena banyak hal yang menurut saya juga tidak masuk akal untuk di untuk diperdebatkan. Misalnya contohnya di sektor pariwisata, hotel, dan restoran. Sudah tahu hotelnya sudah tutup, sudah tutup 1 bulan lebih bener-bener nggak terima tamu. Itu masih masih aja apa perdebatan aja suruh bayar itu yang kadang-kadang membuat kami juga apa ya tertekan juga. Nih bagaimana sih kan perusahaan itu perseroan terbatas tergantung daripada bagaimana kondisi perseroan itu tapi karena sudah tidak make sense lagi misalnya mengejar ya udah kan apa namanya si pengusahanya harus membayar apa dengan mentop-up lah kira-kira gitu. Nah masalahnya sekarang dia mau top up itu kalau si pengusahanya masih punya cadangan. Kalau tidak punya cadangan dia pun kalau mau menjual asetnya juga tidak mudah dalam kondisi seperti ini. Jadi inilah hal yang

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Interupsi izin Pimpinan sebentar Pak Haryadi. Saya ingin memastikan saja apakah dalam hal ini Apindo dan Kadin itu memiliki atau berada dalam kapasitas atau posisi yang bisa melakukan skrining atau assesment terhadap Anggotanya yang mungkin tadi dalam tanda kutip bisa dikategorikan sebagai penumpang gelap atau mengambil keuntungan manfaat dari pandemi ini. Misalnya kalau memang betu dia tidak mampu ya tidak mampu termasuk para debitur yang melakukan permohonan restruktur misalnya itu kan juga ada kemungkinan dalam tanda kutip orang yang memanfaatkan situasi ini. Nah apakah dari Apindo ada kapasitas atau ada dalam posisi yang bisa melakukan assesment terhadap Anggotanya ini benar memang dia tidak mampu dan melakukan penerapan cuti diluar tanggungan meskipun itu PHK secara halus karena dengan adanya orang tidak bekerja Pak itu langsung secara psikologis itu makin memperburuk kondisi ini gitu. Dia stay at home itu tidak dalam kondisi memiliki penghasilan dan tidak berkarya tidak keluar rumah itu saja sudah sudah sangat memperburuk kondisi gitu Pak Hariyadi terimakasih.

APINDO (HARIYADI):

Begitu bu Indah jadi kalau untuk kapasitas mengetahui tentunya kami tidak mempunyai kapasitas tersebut. Ya karena memang jumlah Anggota kami ini kan cukup besar ya Apindo itu 15.000 perusahaan. Kapasitas untuk mengetahui apakah kalau yang terkait dengan perbankan pasti banyak yang lebih tahu tapi kalau terkait dengan masalah ketenagakerjaan dapat kami sampaikan begini Bu jadi kalau di perusahaan itu rata-rata karyawan itu kan juga apa tidak hanya yang apa di operasional buk ya tapi juga di lapangan. Sehingga kalau kami melihat sekarang dengan keterbukaan informasi karyawan itu tahu persis perusahaan itu mempunyai kemampuan seperti apa dan bagaimana mereka melakukan apa namanya penjadwalan ataupun melakukan pengelolaan(suara tidak jelas)... Itu. Jadi yang kami lihat sekarang itu bu, karyawan dan perusahaan itu mereka terbuka. Perusahaan punya dana sekian, mereka mau perhitungkan bisa stay atau bisa

bertahan sampai kapan. Yang tadi kami sampaikan di depan sampai Juni itu adalah karena mereka sudah buka kebanyakan dari perusahaan kita ini adalah agak berbeda mungkin ya dengan perusahaan Jepang atau Korea yang mereka mempunyai cadangan yang relatif lebih panjang jadi mereka punya cadangan biasanya lebih dari 3 bulan modal kerja.

Nah perusahaan di Indonesia itu adalah di bawah itu. Jadi mereka karakternya perusahaan Indonesia itu kalau punya uang lebih kita ekspansi terus buk jadinya itu tambah-tambah. Jadi kadang-kadang mereka nggak mikir harus ada tabungan. Nah ini yang terjadi karena tabungannya itu apa terbatas sehingga mereka sekarang ini kelabakan menghadapi situasi itu, tapi kalau dapat kami sampaikan Insya Allah sih kalau dari segi keterbukaan informasi mayoritas itu adalah karyawan dan manajemennya tahu persis.

Jadi makanya kalau kita lihat hari ini kan gejolaknya nggak begitu ramai gitu ya kan. Harusnya kan ini udah pasti rlbut besar ya, apalagi mau THR tapi karena keterbukaan tadi kelihatannya para pihak itu sudah memahami. Makanya kami juga meminta kepada pemerintah waktu itu tapi sayangnya kita ditolak masalah yang pra kerja. Pra kerja itu kami sangat berharap sebetulnya dijadikan BLT dan bisa disalurkan kepada karyawan yang memang sekarang dirumahkan. Ini juga menjadi masalah besar karena selama ini karyawan di sektor formal ini kan tidak pernah memang dia selama ini motor pembangunan jadi tidak pernah bermasalah, tapi begitu sekarang tiba-tiba bermasalah ini akan menjadi harus di-update lagi data pemerintah. Yang tadinya punya uang sekarang tidak punya uang dan jumlahnya itu kami yakini relatif besar buk itu antara 40 juta sampai 50 juta orang di sector formal yang tiba-tiba sekarang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya tidak mampu.

Mungkin apa yang terakhir tadi masalah THR ya THR ini Pak Hatari tadi THR tadi juga begitu Pak, jadi sekarang ini kita kalau di perusahaan sudah sangat terbuka dengan karyawan dan mereka tahu persis situasinya. Hanya memang yang kita apa yang kita prihatin betul tadi ada yang tidak ada apa sih perusahaan baik pengusahanya maupun karyawan yang ingin apa yang melewati dari pada hari raya idul fitri kita dengan kondisi seperti ini tapi memang inilah kenyataan yang ada yang menurut pandangan kami realitasnya adalah seperti itu dan yang paling penting bagi kami di sini adalah keterbukaan saja. Kami selalu menghimbau temen-temen pengusaha pokoknya terbuka. Kalau mampu masih ada uang kasihin ke pekerjanya tapi kalau nggak mampu kasih tahu kondisinya dan bicarakan baik-baik untuk bagaimana cari jalan keluar tapi yang jelas status daripada karyawan itu tidak ter-PHK, mayoritas tidak ter-PHK.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.)

Baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hariyadi Sukamdani Ketua umum Apindo dan juga kepada Pak Rosan Roeslani, Ketua umum Kadin Indonesia yang telah memberikan masukan kepada kita semua mengenai kondisi dunia usaha di tengah-tengah pandemic Covid-19 ini dan terima kasih yang luar biasa kami sampaikan atas kesediaan dunia usaha dan tadi diwakili oleh Kadin dan Apindo sehingga menambah wawasan kita untuk bahan kita melaksanakan rapat besok.

Dan kalau sudah tidak ada lagi tepat jam 15.27, jam setengah 4 sesuai dengan Rapat Dengar Pendapat Umumpada hari ini hari Senin tanggal 27 April saya tutup dan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melewati Covid-19 ini dan juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kita perbanyak berdoa mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu dan kita dunia usaha, parlemen, pemerintah semua sehat, sama-sama bergotong-royong dapat menyelesaikan, dapat melewati Covid ini dan mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu.

Baik dengan mengucapkan *hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin* Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kadin dan Apindo saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

Jakarta, April 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001